

**ANALISIS PENGENDALIAN BALAI PRASARANA PERMUKIMAN
WILAYAH JAMBI DALAM PROYEK INSTALASI PENGOLAHAN
AIR LIMBAH (IPAL) DI KOTA JAMBI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai upaya memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu
Pemerintahan pada Fakultas Hukum Universitas Jambi



Oleh:

SHAFa MARDHOTILLAH

NIM. B1B121034

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JURUSAN ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JAMBI
JAMBI
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS PENGENDALIAN BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAMBI DALAM PROYEK INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH KOTA JAMBI

Nama : Shafa Mardhotillah
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
NIM : B1B121034

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing 2 untuk
diajukan ke Sidang Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi, 11 April 2025

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2

Michael Lega., S.IP., M. IP

NIP 199204132019031011

Suci Rahmadani, S.I.P., M.I.P

NIP 199406102024062003

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PENGENDALIAN BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAMBI DALAM PROYEK INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH KOTA JAMBI

Nama : Shafa Mardhotillah

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

NIM : B1B121034

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Sidang
Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi, 10 Juni 2025

Dewan Penguji Sidang Skripsi

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	M. Yusuf, S.Sos., M. I. P.	Ketua Penguji	1.
2.	Michael Lega, S. IP., M. I. P.	Anggota	2.
3.	Suci Rahmadani, S. I. P., M. I. P.	Anggota	3.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hartati, SH., M. H.
NIP 197212031998022001

LEMBAR PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi kepada

Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa

Ibu dan Almarhum Ayah Tercinta

Keluarga Besarku

Teman-Teman Seperjuangan

Almamater Tercinta

LEMBAR MOTTO

“ You don’t have to be great to start, but you have to start to be great. ”

(Zig Ziglar)

“No one knows what the outcome will be. So as much as you can, choose whatever you’ll regret the least.”

(Levi Ackerman)

SURAT PERNYATAAN

Nama : Shafa Mardhotillah
Nim : B1B121034
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul : Analisis Pengendalian Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi dalam Proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kota Jambi
Alamat : Jl. A. Chatib RT 14 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura
No. Hp : 083171204983

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil dari karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penciplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas Jambi, maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dan jelas di cantumkan sebagai acuan dengan menyebut naman pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 11 April 2025

Yang membuat pernyataan

Shafa Mardhotillah

ABSTRACT

This study aims to analyze the control process carried out by the Jambi Regional Settlement Infrastructure Center (BPPW) in the implementation of the Wastewater Treatment Plant (WWTP) project in Jambi City. This project is part of the government's efforts to improve the quality of sanitation and overcome environmental pollution due to domestic waste. However, in its implementation, there are various challenges, both from technical aspects such as unpredictable soil structure to social obstacles in the form of residents' rejection due to lack of socialization. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques are carried out through interviews, observations, and documentation. The analysis was carried out based on Robbins and Coulter's control indicators, namely standardization, performance measurement, comparison of actual results with standards, and corrective actions. The results of the study show that BPPW has set work guidelines through a national circular, but does not have an internal Standard Operating Procedure (SOP) specific to the WWTP project. Performance measurement and evaluation still relies on written reports and regular meetings, while work delays and lack of community involvement remain major obstacles. Therefore, this study recommends the need to strengthen coordination between agencies, prepare internal SOPs, improve public communication and systematic field data-based evaluation as part of corrective actions.

Keywords: Control, Wastewater Treatment Plant, Regional Settlement Infrastructure Center, Sanitation, Government Management

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengendalian yang dilakukan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jambi dalam pelaksanaan proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kota Jambi. Proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sanitasi dan mengatasi pencemaran lingkungan akibat limbah domestik. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai tantangan, baik dari aspek teknis seperti struktur tanah yang tidak dapat diprediksi hingga kendala sosial berupa penolakan warga akibat minimnya sosialisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan berdasarkan indikator pengendalian Robbins dan Coulter, yaitu penetapan standar, pengukuran kinerja, perbandingan hasil aktual dengan standar, serta tindakan korektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPPW telah menetapkan pedoman kerja melalui surat edaran nasional, namun belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) internal yang spesifik untuk proyek IPAL. Pengukuran dan evaluasi kinerja masih bergantung pada laporan tertulis dan pertemuan rutin, sedangkan keterlambatan pekerjaan serta kurangnya pelibatan masyarakat masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan koordinasi antar instansi, penyusunan SOP internal, peningkatan komunikasi publik dan evaluasi berbasis data lapangan yang sistematis sebagai bagian dari tindakan korektif.

Kata kunci: *Pengendalian, Instalasi Pengolahan Air Limbah, Balai Prasarana Permukiman Wilayah, Sanitasi, Manajemen Pemerintahan*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas seluruh rahmat dan hidayahNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan laporan akhir skripsi dengan judul "**Analisis Pengendalian Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi dalam Proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kota Jambi**" yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Hukum Universitas Jambi. Tak lupa shalawat serta salam penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Maka dari itu peneliti dengan setulus hati menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H., sebagai Rektor Universitas Jambi yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada seluruh Mahasiswa Universitas Jambi untuk menempuh pendidikan di lingkungan yang kondusif dan menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan proses penelitian skripsi.
2. Ibu Dr. Hartati, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan dukungan melalui kebijakan akademik yang membantu kelancaran proses perkuliahan.
3. Ibu Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerja Sama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah mengembangkan teknologi sistem informasi yang memudahkan dalam proses akademik.

4. Bapak Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerja Sama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan arahan secara akademis dan administratif.
5. Bapak Dr. A. Zarkasih., S.H., M.Hum., sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membina dan memotivasi bagi mahasiswa.
6. Bapak Rio Yusri Maulana, S. IP., M. I. Pol., Ph.D, sebagai Ketua Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memotivasi mahasiswa dalam mencapai prestasi akademik.
7. Bapak Alva Beriansyah., S.IP., M.I.P., sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dalam membina dan memberi arahan mahasiswa untuk berkembang.
8. Ibu Riri Maria Fatriani, S.Sos., M.Si., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan, memotivasi, dan membina serta memberikan nasihat yang sangat berharga bagi penulis semenjak awal semester.
9. Bapak Michael Lega, S. IP., M.I.P., sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, saran serta waktu untuk membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi.
10. Ibu Suci Rahmadani, S.I.P., M.I.P., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan motivasi, masukan, saran serta waktu untuk membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi.

11. Bapak Drs. Navarin Karim, M. Si., sebagai Dosen Penguji Proposal yang telah memberikan saran yang mendalam untuk melakukan penelitian terkait dengan proyek.
12. Bapak M. Yusuf, S.Sos., M. I. P., sebagai Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan arahan untuk memahami lebih dalam mengenai materi skripsi.
13. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan Ilmu dan pengalaman yang diberikan selama masa studi tidak hanya bernilai akademis, juga memberikan bekal berharga dalam menghadapi dunia profesional dan bermasyarakat.
14. Bapak/Ibu Tenaga Administrasi Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi yang telah memberikan pelayanan administrasi.
15. Seluruh informan dan pihak-pihak yang telah meluangkan waktu serta memberikan informasi yang sangat membantu penulis dalam proses penulisan skripsi
16. Ayahku yang tersayang yang telah berpulang ke Rahmatullah dan Ibuku tercinta, sosok teladan yang tidak pernah lelah memberi semangat di setiap langkah hidup kepada penulis. Dengan penuh cinta dan kerinduan yang mendalam, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas cinta, kerja keras, apresiasi, pelajaran serta pengorbanan Ayah semasa hidup, dan Ibu yang mampu membuat penulis bertahan hingga berada di tahap yang sekarang. Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah, melapangkan tempat peristirahatan Ayah. Tak lupa pula terima kasih yang sedalam dalamnya untuk Ibu yang telah mengupayakan segala cara untuk membuat penulis merasa

dicintai dan disayangi, semoga Ibu selalu berada di dalam lindunganNya. Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh cinta dan hormat untuk Ayah dan Ibu. *Everything I am, you helped me to be.*

17. Datuk dan Nenek yang selalu mendukung serta merawat penulis sedari kecil. Banyak sekali dukungan moral, material serta doa yang tidak bisa penulis sebutkan karena kasih sayang Datuk dan Nenek yang tidak terhingga. Semoga kalian selalu berbahagia, panjang umur dan sehat selalu.
18. Teman penulis sejak 2016 yang selalu berada dalam ingatan penulis. Terima kasih atas segala dukungan, pelajaran dan masukkan yang telah kamu beri selama ini, semoga kamu sehat selalu.
19. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis yang memberikan dukungan moral dan menemani penulis layaknya keluarga, Dizka, Dinta, Nazila, Sherly, Beby, Putri, Mahesa, Agung, Norris, Aziz, Rifky, Ridwan, Wahyu, Ragil dan Opal. Mereka senantiasa memberikan arahan, informasi dan tak lupa pula perhatian yang tidak akan pernah penulis lupakan. Semoga kalian semua berbahagia selalu dimanapun kalian berada.
20. Sahabat-sahabat penulis yang selalu menghibur penulis dikala masalah hidup melanda, Ayudia, Anisa, Elsy, Wahyu, Maulana, Amor, Wili, Faiz dan Dino. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk sekedar bercengkrama singkat dengan penulis untuk mendistraksi pikiran sejenak. Segala momen bahagia dan tawa dengan kalian akan abadi selalu di ingatan penulis.

21. Rekan BPH Cinema 2024-2025 yang sempat menjadi pelengkap kehidupan perkuliahan penulis. Terima kasih atas momen-momen berharga serta penuh suka duka yang kita lewati. Kalian luar biasa.
22. Ruang ini merupakan sejumlah kata yang ingin kusampaikan untuk diri sendiri. Bermula dari ketakutan, mulai beranjak menjadi mandiri, meskipun masih seringkali lalai, Aku tetap bangga. Selamat merayakan, selamat menikmati atas segala kondisi dan selamat bertahan hingga tiba waktunya. Nikmati, syukuri dan benahi. Mari hidup lebih lama dan berbahagialah.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan sari skripsi yang disebabkan oleh keterbatasan dan pengetahuan penulis, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga segala arahan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik dari Allah *Subhanahu wa ta'ala*. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin*.

Jambi, 21 April 2025

Shafa Mardhotillah

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
LEMBAR MOTTO	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1. 1. Latar Belakang	1
1. 2. Rumusan Masalah	10
1. 3. Tujuan Penelitian.....	10
1. 4. Manfaat Penelitian.....	11
1. 5. Landasan Teori	11
1. 5. 1. Manajemen Pemerintahan.....	12
1. 5. 2. Pengawasan.....	15
1. 5. 3. Pengendalian.....	18
1. 6. Kerangka Pikir.....	24

1. 7. Metode Penelitian.....	24
1. 7. 1. Jenis Penelitian	25
1. 7. 2. Lokasi Penelitian.....	26
1. 7. 3. Fokus Penelitian.....	26
1. 7. 4. Sumber Data	26
1. 7. 5. Teknik Penentuan Informan.....	27
1. 7. 6. Teknik Pengumpulan Data	28
1. 7. 7. Teknik Analisis Data	30
1. 7. 8. Keabsahan Data	31
BAB II	32
DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	32
2.1. Deskripsi atau Gambaran Umum Kota Jambi.....	32
2. 1. 1. Profil Singkat dan Sejarah Kota Jambi.....	32
2. 1. 2. Keadaan Geografis Kota Jambi	33
2. 1. 3. Kondisi Demografi Kota Jambi	35
2. 2. Deskripsi atau Gambaran Umum Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi.....	36
2. 2. 1. Profil Singkat Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi	36
2. 2. 2. Visi dan Misi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi	37
2. 2. 3. Tugas dan Fungsi Balai Prasarana Permukiman Wilayah.....	37
2. 2. 4. Struktur Organisasi Balai Prasarana Permukiman Wilayah	39
BAB III.....	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
3. 1. Pengendalian Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi dalam Proyek IPAL di Kota Jambi.....	41
3. 1. 1. Penetapan Standar	41

3. 1. 2. Pengukuran	44
3. 1. 3. Membandingkan	48
3. 1. 4. Tindakan Korektif.....	52
3. 2. Solusi dari kendala dalam pengerjaan proyek IPAL di Kota Jambi.....	56
BAB IV	60
KESIMPULAN DAN SARAN	60
4. 1. Kesimpulan.....	60
4. 2. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tipe Pengendalian	21
Gambar 1. 2 Proses Pengendalian	21
Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kota Jambi	33
Gambar 3. 2 Dokumentasi Minutes of Meeting	46
Gambar 3. 3 Perbaikan kondisi lapis aspal	47
Gambar 3. 4. Galian Proyek IPAL	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kecamatan Kota Jambi	33
Tabel 3. 1 Hasil Survei SR April 2023.....	45
Tabel 3. 2 Realisasi Pekerjaan Kontraktor	49

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	68
LAMPIRAN 2	72
LAMPIRAN 3	76

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Padatnya pertumbuhan penduduk menyebabkan meningkatnya tingkat pencemaran air karena dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk juga berarti meningkatnya produksi limbah rumah tangga seperti deterjen, tinja dan sampah organik. Pencemaran air dapat terlihat dari fisiknya yang terjadi perubahan warna, keruh dan bau dan biasanya berasal dari kegiatan yang dilakukan berulang (Sholichin, 2021). Air yang sudah tercemar dapat merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Dampak negatif yang disebabkan oleh bakteri yang berasal dari air limbah yaitu berbagai penyakit infeksi, seperti diare, kolera, tifus dan hepatitis (Dahruji et al., 2016). Hal itu terjadi karena belum adanya sarana sanitasi yang cukup untuk menanggulangi penyebaran penyakit menular melalui air dan tinja.

Sarana sanitasi yang baik bisa mengurangi penyebaran penyakit, menjaga kelestarian lingkungan dan berdampak positif pada ekosistem, serta, sanitasi yang baik merupakan salah satu pilar dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Lumunon et al., 2021). Pemerintah perlu mengantisipasi pengolahan limbah agar limbah yang dihasilkan tidak merugikan masyarakat dan merusak lingkungan. Contohnya seperti program sanitasi berbasis masyarakat di Kabupaten Tulungagung yang dirancang untuk meningkatkan kondisi sanitasi dengan melibatkan partisipatif aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan

akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat, terutama di daerah padat penduduk (Rachmaddianto, 2015). Namun, terdapat berbagai cara lain untuk mengendalikan pencemaran sektor domestik atau sumber utama limbah rumah tangga yang berpotensi mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik, salah satunya dengan pembangunan proyek IPAL.

Proyek IPAL adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengolah air limbah domestik agar kualitasnya tidak merusak lingkungan dan menjaga kualitas air tanah (Heston, 2017). Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah sistem yang dirancang untuk mengolah air limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Pembangunan IPAL merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pencemaran air dan meningkatkan kualitas sanitasi. Pemerintah pusat dan daerah memiliki peran yang penting dalam perencanaan, pembangunan dan pengelolaan IPAL serta bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan terkait dengan pengelolaan limbah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup yang menyebutkan perlu adanya upaya untuk melestarikan lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan hidup. Pada skala nasional, Proyek IPAL sendiri sudah dilakukan di 3 daerah di Indonesia, yaitu di Kota Makassar, Kota Pekanbaru dan Kota Jambi. Proyek tersebut termasuk dalam program *Metropolitan Sanitation Management Investment Project* (MSMIP) dan mencakup pembangunan IPAL skala perkotaan.

Adapun contoh proyek IPAL yang telah dilakukan, seperti, di Kota Pekanbaru. Proyek ini berlangsung dari tahun 2020 dan diresmikan oleh Presiden

Joko Widodo pada 31 Mei 2024. Proyek ini bertujuan untuk mengolah air limbah domestik menjadi air bersih yang dapat dikembalikan ke waduk. Dengan kapasitas sebanyak 8.000 m³ per hari dan jaringan sambungan rumah dapat mencapai sebanyak 11.000 sambungan (Laksono, 2023). Contoh selanjutnya berasal dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Proyek ini dibangun sejak 2019 sampai dengan 2023, menghabiskan anggaran sebesar 1,2 triliun. IPAL Losari terletak di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, memiliki kapasitas 16.000 m³ air limbah per hari dan diharapkan dapat melayani 46.000 sambungan rumah. Tujuan proyek ini, meningkatkan kualitas air limbah, menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan (Isman, 2024). Selain daerah-daerah yang sudah disebutkan sebelumnya, proyek IPAL juga sedang dilakukan di Kota Jambi.

Proyek Instalansi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Kota Jambi yang dilaksanakan di 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Jambi Timur dan Kecamatan Pasar. Pada Kecamatan Jambi Timur terdapat 9 Kelurahan yang menjadi lokasi penggalian pipa, yaitu: Kelurahan Talang Banjar, Kelurahan Budiman, Kelurahan Sulanjana, Kelurahan Rajawali, Kelurahan Kasang, Kelurahan Kasang Jaya dan Kelurahan Tanjung Sari (Priyanti, 2023). Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan upaya fungsi lingkungan hidup, melindungi kualitas air tanah dan mengendalikan pembuangan air limbah domestik. Hal itu tertuang dalam Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2015 mengenai pengelolaan air limbah domestik atau permukiman. Terdapat 3 perusahaan yang bertanggungjawab atas penggalian proyek, antara lain: PT. Adhi Karya yang bertanggung jawab atas pembangunan jaringan perpipaan di

wilayah Pasar, PT. Waskita Karya bertanggung jawab atas pembangunan jaringan perpipaan di wilayah Kecamatan Jambi Timur dan PT. Brantas Abhipraya bertanggung Jawab atas pembangunan IPAL di wilayah Kecamatan Jambi Timur (Akhmad, 2023). Dengan total dana anggaran sebesar 608 Miliar Rupiah, proyek ini didanai melalui pinjaman dari *Asian Development Bank* (ADB) sebesar 401 Miliar Rupiah dan Belanja Negara (APBN) sebesar 207 Miliar Rupiah (Darma, 2024).

Pengembangan IPAL terpusat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2015 mengenai pengelolaan air limbah domestik atau permukiman menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota. Dalam proyek IPAL yang beroperasi di Kota Jambi terkhusus di Kecamatan Jambi Timur terdapat beberapa instansi yang terlibat antara lain; Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi (BPPW) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi yang bertanggung jawab dalam sektor atas pengelolaan pembangunan proyek. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, BPPW memiliki peran yang sangat vital dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional di bidang sanitasi. BPPW di bawah naungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR yang memiliki tugas pokok melaksanakan pembangunan, pengawasan, serta pembinaan teknis infrastruktur permukiman di wilayah kerjanya.

Pada Proyek IPAL Kota Jambi, BPPW bertugas memastikan bahwa setiap tahap pelaksanaan proyek yang dimulai dari perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi hingga pengendalian proyek berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Fungsi BPPW mencakup koordinasi lintas sektor, pelaksanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi serta fasilitasi keberlanjutan proyek, termasuk penyiapan kelembagaan pengelola dan serah terima aset kepada pemerintah daerah. Peran BPPW dalam proyek IPAL tidak hanya bersifat administratif, namun juga substantif. Keberhasilan atau kegagalan proyek sangat ditentukan oleh efektivitas pelaksanaan yang dijalankan oleh BPPW, termasuk bagaimana BPPW mampu mengendalikan proses pembangunan melalui pengawasan teknis dan koordinasi lintas lembaga. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana tugas dan fungsi BPPW berjalan secara optimal dalam Proyek IPAL ini, serta bagaimana urgensi perannya berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat di Kota Jambi.

Pelaksanaan Proyek IPAL dimulai pada tahun 2021 dan menimbulkan banyak permasalahan terutama gangguan lalu lintas akibat lambatnya penyelesaian proyek galian pipa. Proyek IPAL awalnya dijanjikan akan selesai di akhir tahun 2023, namun, hingga di tahun 2024 akhir, proyek tersebut masih belum selesai di kawasan Jalan Brigjen Katamso dan Jalan Raden Pamuk (*Proyek IPAL Di Kota Jambi Dipastikan Rampung Bulan Ini*, n.d.). Penggalan pipa di beberapa kawasan yang padat sering menyebabkan kemacetan. Kemacetan dan penyempitan jalan yang terjadi akibat proyek ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, mengakibatkan kesulitan akses dan meningkatnya waktu tempuh harian (Annisa et al., 2024).

Selain kemacetan, terdapat juga kecelakaan lalu lintas yang memakan korban sehingga korban terperosok ke dalam galian lubang yang berada di tengah

jalan sehingga korban dan kendaraannya masuk ke dalam lubang proyek diperkirakan kedalamannya kurang lebih sedalam 5 meter yang berada di tengah jalan (Sanjaya, 2023). Upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi untuk menanggulangi berbagai problematika lalu lintas yang disebabkan oleh proses pembangunan proyek IPAL, salah satunya dengan perbaikan infrastruktur jalan yang rusak akibat proyek untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas.

Pembahasan mengenai Proyek IPAL pada dasarnya menarik untuk dilakukan dikarenakan beberapa peneliti telah melakukan penelitian dengan topik terkait, diantaranya adalah; Pertama, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Siko Fadil Muhamad, Fenti Prihatini Dance Tui, Yacob Noho Nani dengan penelitian yang berjudul “Strategi Kebijakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik : Studi Kasus di Desa Tunggulo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango.” Yang membahas tentang Strategi kebijakan sistem pengelolaan air limbah domestik dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik di Desa Waitlo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango. Strategi ini memerlukan penanganan lintas sektoral, termasuk pemerintah desa, Balai BPPW (Pusat Prasarana Permukiman Daerah), Dinas PUPR, dan Bappeda. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk perencanaan kebijakan, dan partisipasi publik—atau partisipasi publik dalam perumusan kebijakan publik—kurang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan karena respons pemerintah terhadap pengetahuan masyarakat kurang dan perlu ditingkatkan (Muhamad et al., 2023).

Selanjutnya, Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Saputri, Fajar Marendra, Ahmad Tawfiequrrahman Yuliansyah, Agus Prasetya yang berjudul “Evaluasi

Aspek Teknis dan Lingkungan IPAL Komunal di Kabupaten Sleman Yogyakarta.” Yang menjelaskan bahwasanya rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan IPAL Komunal adalah sebagai berikut: (1). melakukan survei di wilayah di mana IPAL Komunal masih kurang digunakan dan mengidentifikasi kondisi dan potensi optimalisasinya berdasarkan kondisi geografi, sebaran rumah, dan kesiapan penduduknya, (2). menetapkan peraturan yang mewajibkan pemilik rumah untuk mengalirkan limbahnya ke IPAL Komunal di wilayah yang direkomendasikan dari hasil survei, (3). menyediakan layanan yang memungkinkan pemilik rumah untuk mengalirkan ke fasilitas IPAL Komunal, seperti kolam fitoremediasi atau wetland buatan (Saputri et al., 2021).

Penelitian selanjutnya datang dari Asmitha Anggraini, Ismail Rachman, Stefanus Sampe yang berjudul “Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Limbah Industri PT Delta Pasifik Indotuna di Kelurahan Girian Bawah Kota Bitung.” Memberi penjelasan mengenai kebijakan lingkungan perusahaan PT Delta Pasifik Indotuna di Kelurahan Girian Bawah Kota Bitung tentang pengelolaan air limbah industri melalui proses perencanaan produksi yang efektif. Ini akan memungkinkan pengurangan limbah industri dengan memanfaatkan IPAL. PT Delta Pasific Indotuna telah diberi sanksi karena pencemaran limbah oleh perusahaan tersebut. Sanksi ini diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung. Tidak ada tindakan pidana yang diambil oleh dinas tersebut terhadap perusahaan, dan sanksi tersebut hanyalah tindakan jera (Anggraini et al., 2021).

Berikutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rahmadi, Agung Prawoto, Diana Sari, Kaheta Mandasari, Maizul Hardinas, M Rizki, Nia Ramadani, Muhammad Firdaus yang berjudul “Strategi komunikasi lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru pada pengerjaan proyek IPAL dalam menanggapi keluhan Masyarakat Kota Pekanbaru.” Membahas mengenai metode komunikasi yang digunakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru untuk menanggapi keluhan masyarakat tentang proyek pembangunan IPAL. Proyek ini cukup mengganggu aktivitas masyarakat Kota Pekanbaru dan menyebabkan banyak masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat, termasuk kemacetan, ekonomi, kerusakan jalan, kerusakan rumah, dan masalah lingkungan akibat debu dan banjir. Oleh karena itu, pemerintah harus menetapkan metode untuk menanggapi keluhan masyarakat. Namun demikian, ada banyak kekurangan dalam implementasinya. Banyak masyarakat yang tidak tahu bagaimana melaporkan keluhan seperti debu, jalan berlumpur, dan banjir selama pembangunan proyek, sehingga mereka harus hidup berdampingan dengan debu dan banjir setiap tahun (Rahmadi et al., 2022)

Terakhir, penelitian ini diteliti oleh Herlina Sattuang, Kahar Mustari, M. Syahrul dengan judul “*The Effectiveness Analysis of Domestic Wastewater Treatment Plants Case Study of Batikite Resort Jeneponto.*” Yang menguraikan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas IPAL domestik yang dibangun berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Metode yang digunakan adalah eksperimen, di mana sampel air limbah diambil sebelum dan setelah proses pengolahan untuk mengukur parameter kualitas air seperti BOD, TSS, amoniak, fosfat, dan minyak. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pengolahan air

limbah untuk mencegah pencemaran lingkungan, terutama karena lokasi resort yang berdekatan dengan pantai. Diperlukan penambahan bahan seperti arang aktif untuk menghilangkan bau dari *effluent* yang dihasilkan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengelolaan limbah domestik di sektor pariwisata, yang merupakan salah satu sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia (Sattuang et al., 2020)

Berdasarkan uraian dari penelitian terdahulu, pembeda dari penelitian sebelumnya terlihat dari penelitian terdahulu memiliki fokus kepada Strategi Kebijakan Pengelolaan Proyek IPAL, Strategi Komunikasi Pemerintah, dan Efektivitas Proyek IPAL. Pada penelitian yang sekarang, peneliti ingin meneliti lebih mendalam terkait dengan Manajemen Pemerintahan terkhusus indikator Pengendalian dalam tata kelola proyek IPAL di Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Pengendalian pemerintahan mengacu pada pengawasan alur kerjasama atau koordinasi antar instansi pemerintahan dan menyelidiki faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan proyek IPAL.

Pengendalian adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi agar supaya pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Sondang, 1987). Pengendalian merupakan strategi untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan juga pengawasan terhadap aktivitas proyek. Dengan pelaksanaan pengendalian secara intensif, diharapkan dapat mengurangi dan meminimalkan berbagai masalah, seperti, masalah penyalahgunaan wewenang, kebocoran, pemborosan, atau efisiensi keuangan dan kekayaan negara serta berbagai bentuk penyelewengan

lainnya. Dengan kata lain, melalui penngendalian diharapkan dapat ditegakkan disiplin kerja di lingkungan pemerintah dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. (Taufiq, 2018).

Berbagai urgensi yang telah dipaparkan pada paragraf-paragraf sebelumnya menjadi dasar atas isu ini diangkat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan berfokus tentang "**Analisis Pengendalian Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi dalam Proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah Kota Jambi**".

1. 2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengendalian dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah dalam melaksanakan proyek IPAL yang berlokasi di Kota Jambi?
2. Apa solusi dari kendala yang terdapat dalam pengerjaan proyek IPAL di Kota Jambi?

1. 3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi pengendalian oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah dalam proyek IPAL Kota Jambi
2. Untuk menemukan solusi dari kendala yang terdapat dalam proses pembangunan proyek IPAL.

1. 4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat di segala aspek, manfaat tersebut, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi penghubung teori dengan praktik pemerintahan, melalui kajian pelaksanaan proyek IPAL yang memperlihatkan sejauh mana teori-teori manajemen dan pengendalian dapat diterapkan dalam konteks kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan agar bisa memberikan masukan bagi pemerintah dalam peningkatan kualitas manajemen pemerintah dalam melaksanakan proyek. Penulis berharap penelitian dapat memberikan wawasan dan gambaran bagi kalangan akademisi dan para *stakeholder* yang berpartisipasi dalam proyek IPAL untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat.

1. 5. Landasan Teori

Landasan teori menjadi dasar yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan dan menjadi acuan untuk menemukan masalah di lapangan. Menurut Sardar Ziauddin (2016). Landasan Teori adalah suatu sistem konsep yang abstrak yang dipakai untuk mengidentifikasi hubungan dari suatu konsep. Teori ini dipakai untuk memahami fenomena yang terjadi dan juga untuk konsep dasar dari sebuah penelitian sosial. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis menjabarkan beberapa landasan teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. 5. 1. Manajemen Pemerintahan

Manajemen adalah proses dimana memulai untuk mengkoordinasi sesuatu. Faktor penting dalam manajemen adalah bagaimana kita dapat mencapai suatu tujuan, bagaimana kita menyeimbangkan tujuan- tujuan yang sekiranya bertentangan, dengan manajemen pula, bagaimana kita membuat pekerjaan menjadi efektif dan tentunya efisien (Hendrawati, 2015, p. 5). Fungsi-fungsi manajemen dengan singkatan *POAC*, yaitu: 1) Perencanaan (*Planning*), 2) Pengorganisasian (*Organizing*), 3) Penggerakam (*Actuating*), 4) Pengendalian/Pengawasan (*Controlling*) (Terry & Rue, 2019). Konsep dasar dari manajemen pemerintahan tidak lain adalah manajemen itu sendiri. Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa di dalam manajemen pemerintahan juga menyoroti proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Manajemen Pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan “tata kelola” atau pengelolaan pemerintahan oleh Penguasa atau penyelenggara pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Supriyanto, 2009).

Manajemen pemerintahan dapat diartikan sebagai metode penerapan kebijakan publik secara terorganisir. Oleh karena itu, tata kelola berfokus pada alat manajemen, pengetahuan teknis, dan keterampilan yang dapat digunakan untuk menerjemahkan gagasan dan pedoman menjadi tindakan (Istianto, 2011). Manajemen pada intinya adalah bagaimana menciptakan *effectiveness* usaha (“*doing right things*”) secara *efficient* (“*doing things right*”) dan produktif, melalui

fungsi dan skill tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan (Ndraha, 2003, p. 159). Fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang dimaksud Taliziduhu Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybernology* (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1, antara lain:

a. Perencanaan Pemerintahan

Perencanaan merupakan tahap awal yang dilakukan untuk menjelaskan tujuan organisasi, menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuannya dan mengembangkan strategi untuk mencapainya. Pemerintah sendiri mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola, melaksanakan program-program pembangunan yang berkaitan dengan fungsinya sebagai ‘pelayanan publik’ (Soares et al., 2015). Melalui perencanaan yang matang, pemerintah dapat menentukan arah pembangunan, mengalokasikan sumber daya secara efisien dan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam menyusun rencana, pemerintah wajib mempertimbangkan berbagai faktor, seperti, kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan agar rencana yang akan dibuat bersifat realistis, fleksibel dan tepat.

Salah satu proyek yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga lingkungan adalah dengan pembangunan IPAL. Perencanaan pemerintah dalam konteks proyek IPAL dapat melibatkan aspek-aspek penting yang harus diperhatikan yaitu dengan melakukan riset lebih mendalam mengenai kebutuhan IPAL di suatu wilayah termasuk identifikasi sumber pencemaran, kapasitas limbah dan kondisi lingkungan. Suksesnya manajemen

proyek IPAL dapat dilihat dari perencanaannya yang tepat sasaran dan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

b. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan

Organisasi merupakan suatu sistem kerjasama yang dilakukan lebih dari satu orang. Organisasi sebagai sistem formal dari hubungan aturan-aturan dan tugas serta keterkaitan otoritas yang mengontrol tentang cara orang bekerja sama dan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi (Saefrudin, 2017). Pengorganisasian menurut Terry merupakan kegiatan dasar dari manajemen dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses. Realisasi (implementasi) langkah-langkah tersebut memerlukan sumber daya dari alam, manusia dan benda. Sumber daya harus diorganisasikan agar bisa dipakai sebelum digunakan. Pengorganisasian sumber daya pemerintah yang baik akan memastikan proyek berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Adapun aspek-aspek penting dalam pengorganisasian sumber daya pemerintahan, antara lain; sumber daya manusia, dana yang dialokasikan, peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek dan data-data mengenai kondisi lingkungan, sosial, ekonomi di wilayah proyek. Dengan mengoptimalkan sumber daya manusia, anggaran, teknologi, dan informasi, pemerintah dapat memastikan bahwa proyek IPAL berjalan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal.

c. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan

Penggunaan sumber pemerintahan dalam manajemen pemerintahan adalah sebuah proses yang dinamis dan saling terkait. Dengan mengoptimalkan semua sumber daya ini, pemerintah dapat menciptakan sistem yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu untuk mendorong sumber daya pemerintah untuk mencapai hasil yang telah ditentukan (Suharyadi & Insani, 2016).

d. Kontrol Pemerintahan

Istilah pengawasan, pengendalian dan pengontrolan secara umum diartikan sama yaitu pengawasan. Dalam ilmu manajemen yang bersumber dari literatur barat tidak dikenal adanya fungsi pengendalian, *controlling* diartikan sebagai pengawasan dalam fungsi manajemen. Bahwa fungsi pengendalian itu sebenarnya ada dan menempati tempat yang penting, tetapi pada umumnya disenafaskan dengan fungsi pengawasan dan tercakup dalam pengertian *controlling* (Sururama & Amalia, 2020). Pengawasan merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai dengan rencana, efektif, efisien, dan akuntabel. Pengawasan juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk mencegah terjadinya penyimpangan, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang.

1. 5. 2. Pengawasan

Pengawasan merupakan proses kegiatan untuk memantau, mengukur, dan melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan dan bertujuan untuk menghindari

penyimpangan atau penyelewengan, baik pada anggaran, proses, maupun kewenangan (Djadjuli, 2018). Pengawasan adalah fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapainya tujuan yang telah ditetapkan semula. Pengawasan terdiri dari fase sebagai berikut : menetapkan standar, mengadakan penilaian (evaluasi), mengadakan tindakan perbaikan (Asvi, 2017). Pengawasan bisa diuraikan sebagai proses dalam memberikan jaminan bahwa sejumlah tujuan yang ditetapkan pada organisasi dalam manajemen bisa terwujud (Romauli Situmeang, 2017).

Kontrol atau pengawasan dimaksudkan "*to exercise restraint or direction over; dominate; command*" (Ndraha, 2003, p. 194). Dengan demikian pengawasan memiliki arti strategis bagi suatu organisasi. Pengawasan yang dimaksudkan disini adalah kontrol terhadap pemerintah, baik yang berasal dari dalam organisasi maupun dari luar. Pengawasan dapat dilakukan oleh siapa saja yang berkepentingan terhadap organisasi yang dalam hal ini pemerintah, pengawasan yang berasal dari dalam organisasi (*built-in-control, internal control dan self control*) dapat dilakukan oleh atasan terhadap bawahan.,Pengawasan merupakan aktivitas penting dalam memastikan segala sesuatu berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam berbagai bidang, terutama dalam pengelolaan proyek, pengawasan memiliki peran yang sangat krusial. Secara obyektif, pengawasan dapat dikategorikan menjadi dua (2), yaitu:

Pengawasan langsung, merupakan suatu bentuk pengawasan di mana pihak yang berwenang secara langsung terlibat dan mengamati pelaksanaan suatu

kegiatan atau pekerjaan. Pengawasan ini dilakukan secara tatap muka dan melibatkan interaksi langsung antara pengawas dengan yang diawasi. (Fajriah et al., 2019). Pengawasan langsung ini dapat berupa: a) Inspeksi langsung, adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan dilakukan, b) Observasi ditempat, adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sebelum kegiatan dilaksanakan, c) Laporan ditempat, adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung kegiatan dilaksanakan. (Sururama & Amalia, 2020) dan Pengawasan Tidak Langsung didefinisikan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh aparat/pimpinan organisasi tanpa mendatangi obyek yang diawasi/diperiksa (Sujamto, 1986). Pengawasan dari jarak jauh melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan berbentuk: a) Laporan tertulis, adalah laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan dalam bentuk laporan kegiatan yang dibukukan, yang dilaporkan secara berkala, b) Laporan lisan, adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung kepada atasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat melakukan kegiatan, baik berupa penyimpangan maupun saran-saran. (Sururama & Amalia, 2020)

a. Teknik Pengawasan

Teknik pengawasan termasuk kedalam aspek manajemen dan pengawasan karena untuk menjalankan pengawasan butuh ditentukannya teknik supaya pengawasan bisa berjalan efektif dan efisien. Berikut adalah teknik pengawasan yang dikemukakan oleh (Ndraha, 2003, pp. 195–208) yaitu;

- i. Pengendalian atau *directing*, merupakan *the continuous task of making decisions and embodying them in specific and general orders and instructions and serving as the leader of the enterprise*. Pengawasan, pengawasan disini dipandang bagian dari kontrol yaitu kontrol sebelum terjadi.
- ii. Pemantauan atau *monitoring*, merupakan proses perekaman fakta yang kemudian diolah dengan teknik analisa data menjadi informasi yang dibutuhkan.
- iii. Evaluasi, merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya.
- iv. Audit, merupakan *an official examination and verification of account and records*.
- v. Supervisi, dapat diartikan sebagai kontrol dari atasan terhadap bawahan.
- vi. Appraisal, yang diartikan sebagai *the act of estimating or judging the nature or value of some one or some thing*.

1. 5. 3. Pengendalian

Konsep pengendalian terkait dengan pengawasan, karena bagian dari proses pengukuran kinerja. Pengendalian merupakan sebuah proses dari mengendalikan, membandingkan dan mengoreksi performa kinerja. Menurut Robbins dan Coulter, Pengendalian merupakan proses dimana pemimpin mengetahui bahwa organisasi atau instansi telah mencapai tujuannya atau tidak (Robbins & Coulter, 2012). Mengukur standar pelaksanaan kinerja organisasi yang dicapai dengan kinerja yang seharusnya dicapai (Sugiyanto, 2016).

1. Tipe Pengendalian

Pengendalian adalah suatu kerangka kerja yang dirancang untuk membantu organisasi maupun instansi mencapai tujuannya dengan cara mengidentifikasi, mengukur, mengelola dan memonitor kinerja operasionalnya. Pengendalian merujuk kepada serangkaian prosedur, kebijakan dan metode yang digunakan untuk memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara efisien. Meskipun antara pengawasan dan pengendalian terdapat pemisahan definisi, namun fungsi pengendalian tidak terlepas dari lingkup pengawasan. Pengendalian memperlakukan pengawasan sebagai masalah dimensi, maka dari itu pengawasan tidak terlepas dari lingkup pengendalian. (Fauzan, 2024). Pengendalian melibatkan standar, yang didalamnya terdiri dari; kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari kegiatan. Sebuah standar dapat dikembangkan dengan cara sendiri-sendiri atau *unilateral*. Dalam fungsi pengawasan modern tidak hanya terpaku bagaimana menemukan kesalahan *auditi* sebanyak mungkin, akan tetapi menurut fungsi pengawasan diupayakan untuk lebih mengacu kepada aspek pemeriksaan dan konsultasi dan aspek efektivitas pengelolaan resiko, baik melalui:

a) Pengawasan pendahuluan atau umpan maju (*feedforward control*)

Pengawasan pendahuluan sering disebut juga dengan *steering control*, direncanakan untuk mengantisipasi masalah-masalah dari standar yang memungkinkan koreksi sebelum tahap suatu kegiatan tertentu diselesaikan. Pengendalian ini bisa disebut sebagai preventif control yaitu pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dikerjakan dengan maksud tidak terjadi penyimpangan.

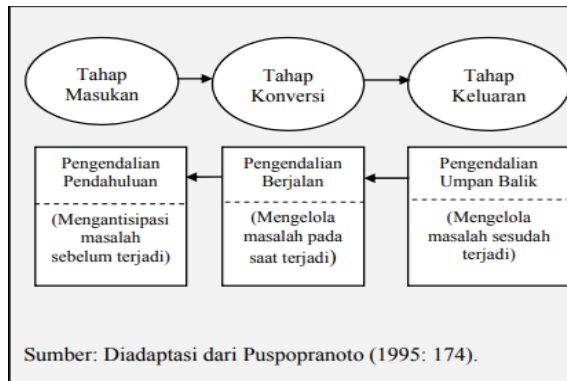
b) Pengendalian *concurrent*

Pengendalian *concurrent* atau berjalan adalah pengendalian yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Pengendalian ini dilakukan secara berlangsung dalam skala sebulan sekali atau satu kuartal sekali atau setahun sekali, bahkan dapat dilakukan secara mendadak. Pengendalian ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilakukan untuk menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan. Pengendalian ini memberikan umpan balik segera kepada pemimpin mengenai bagaimana *input* diubah menjadi *output* sehingga pemimpin dapat memperbaiki masalah pada saat timbul. Pengendalian ini membuat pemimpin untuk memberikan reaksi secara cepat terhadap apapun sumber masalahnya.

c) Pengendalian umpan balik (*feedback control*)

Pengendalian umpan balik dikenal sebagai *past action control*, yaitu mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Pengendalian ini dilakukan setelah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan sehingga perencanaan berjalan dengan semestinya. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan dan penemuan diterapkan untuk kegiatan yang serupa di masa yang akan datang.

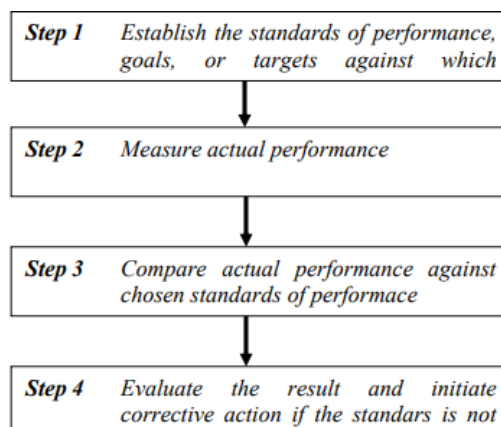
Gambar 1. 1 Tipe Pengendalian



2. Proses Pengendalian

Proses pengendalian merupakan serangkaian aktivitas yang terkait satu sama lain, tidak bersifat linear yang memantau pelaksanaan kinerja aktual sesuai dengan penetapan standar yang seharusnya dicapai. Proses pengendalian menunjukkan pentingnya sistem kontrol dalam instansi maupun organisasi yang direncang untuk memastikan kegiatan berjalan dengan lancar. Proses pengendalian meliputi empat langkah atau tahapan, yaitu; (1) Penetapan standar kinerja (*planning*); (2) Pengukuran kinerja aktual (*measuring*); (3) Membandingkan kinerja aktual dengan standar (*comparing*); dan (4) Pengambilan tindakan korektif (*evaluating*).

Gambar 1. 2 Proses Pengendalian



Sumber: George and Jones (2006: 497)

1) Penetapan standar (*planning*)

Menurut Robbins dan Coulter Penetapan standar merupakan langkah awal dalam proses pengendalian yang berfungsi sebagai tolak ukur penilaian kinerja aktual organisasi, proyek atau aktivitas. Urgensi dari penetapan standar yakni standar berfungsi untuk menjadi acuan bagi seluruh anggota untuk memahami ekspektasi yang diharapkan dari mereka dan membantu dalam mengidentifikasi hal yang perlu diperbaiki dan memberikan dasar untuk evaluasi kinerja. (Robbins & Coulter, 2012).

2) Pengukuran kinerja (*measuring*)

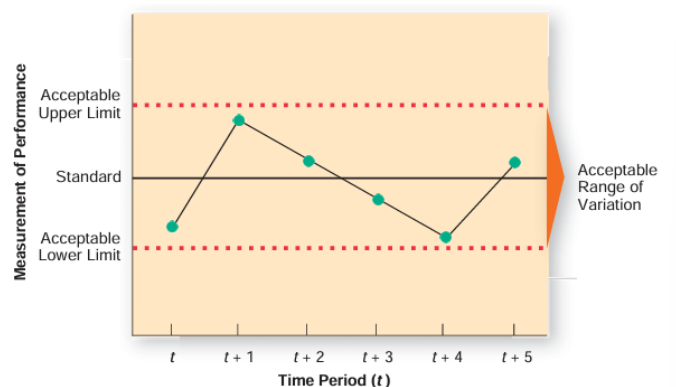
Pengukuran merupakan proses penting dalam memastikan bahwa semua aktivitas berjalan dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengukuran memberikan gambaran jelas tentang kinerja instansi dalam proses yang sedang berlangsung untuk mencapai tujuannya. Aspek yang dicakup oleh indikator ini, seperti produktivitas, efisiensi dan kualitas *output*. Untuk mengetahui kinerja aktual yang telah dilakukan dapat melalui observasi langsung, laporan statistik, laporan lisan dan laporan tertulis. Dalam penerapan indikator pengukuran, atasan/manajer dapat mengidentifikasi bagian yang memerlukan perhatian lebih, serta mengukur efektivitas strategi yang direncanakan sebelumnya (Robbins & Coulter, 2012).

3) Membandingkan (*comparing*)

Indikator membandingkan dalam pengendalian merupakan langkah penting dalam mengevaluasi kinerja organisasi dengan cara membandingkan hasil aktual dengan standar yang telah ditetapkan (Robbins & Coulter, 2012). Membandingkan berfungsi untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun

pendukung dalam proses kerja. Dengan memahami penyebab dari kesenjangan yang terjadi di lapangan, maka, atasan/manajer dapat mengambil langkah yang tepat untuk memperbaiki. Dengan demikian, indikator membandingkan dalam pengendalian manajemen bukan hanya sekadar alat untuk mengontrol, tetapi juga merupakan mekanisme strategis yang memungkinkan organisasi untuk belajar dan berkembang

Gambar 1.3 Membandingkan Kinerja



Sumber: Stephen P. Robbins and Mary Coulter (2012: 489)

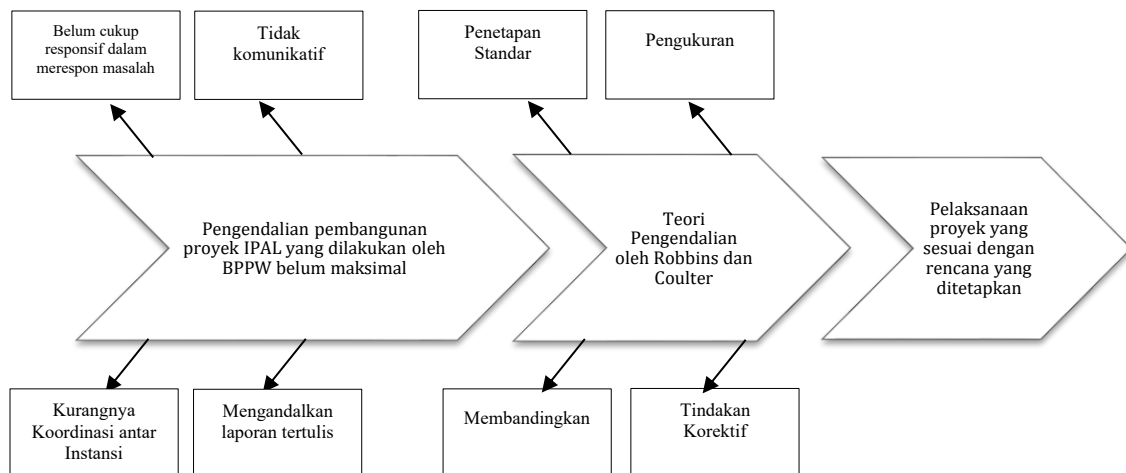
4) Pengambilan tindakan korektif (*evaluating*)

Melakukan tindakan dalam pengendalian manajemen merupakan langkah penting yang diambil setelah proses pengukuran dan perbandingan kinerja. Tindakan yang diambil setelah menganalisis kesenjangan yang terjadi di lapangan bisa berupa perbaikan proses, pelatihan tambahan atau penyesuaian alokasi sumber daya. Dalam melakukan tindakan memerlukan komunikasi yang jelas sesama anggota mengenai tindak lanjut yang akan diambil dalam memperbaiki kesenjangan yang ada. Keterlibatan antar anggota sangat penting karena mereka adalah pihak yang akan melaksanakan tindakan tersebut. Setelah tindakan telah dilaksanakan, tentu memerlukan evaluasi terhadap hasilnya, evaluasi ini akan memberikan umpan

balik yang berharga untuk perbaikan lebih lanjut. Melalui tindakan yang tepat dan terencana, organisasi dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dan terus bergerak maju menuju pencapaian tujuan strategisnya.

1. 6. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah suatu sistematisasi pemikiran yang digunakan untuk menghubungkan variabel-variabel penelitian dan menjelaskan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Pada penelitian mengenai pengendalian BPPW Jambi dalam mengelola proyek pembangunan IPAL, penulis menggunakan kerangka *fishbone* untuk mengidentifikasi penyebab dari suatu masalah.



1. 7. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian berhubungan erat dengan

prosedur, teknik, alat serta desain penelitian yang digunakan. Desain penelitian harus cocok dengan pendekatan penelitian yang dipilih. Pada kasus penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan data mengenai pengendalian BPPW dalam proyek IPAL. Data dikumpulkan melalui berbagai teknik, seperti wawancara, observasi dan analisis dokumen.

1. 7. 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah proses yang terdiri dari langkah-langkah untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai suatu topik atau isu (Amruddin et al., 2022). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu strategi pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif dalam penelitian ilmiah (Sidiq & Choiri, 2019). Dalam penelitian ini, penelitian kualitatif dapat mengidentifikasi potensi permasalahan dan dapat menggali lebih dalam tentang perspektif, sistematika struktur yang terkait dengan proyek IPAL.

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat dan sistematis tentang suatu fenomena, peristiwa, atau variabel tertentu pada suatu waktu tertentu (Sidiq & Choiri, 2019). Pendekatan deskriptif sangat efektif dalam memberikan gambaran yang rinci mengenai suatu fenomena atau variabel saat penelitian dilakukan.

1. 7. 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kota Jambi, tepatnya pembangunan proyek IPAL tersebut tersebar di daerah Kecamatan Jambi Timur lebih tepatnya di Kelurahan Talang Banjar, Kelurahan Budiman, Kelurahan Sulanjana, Kelurahan Rajawali, Kelurahan Kasang, Kelurahan Kasang Jaya dan Kelurahan Tanjung Sari.

1. 7. 3. Fokus Penelitian

Peneliti akan berfokus kepada alur pengendalian pada pembangunan proyek IPAL oleh BPPW Jambi. Serta peneliti juga akan mengidentifikasi apa saja faktor penghambat maupun faktor pendukung yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh Instansi.

1. 7. 4. Sumber Data

Sumber data merupakan elemen penting dalam penelitian yang menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data adalah bahan baku yang diolah menjadi informasi dan diolah menjadi temuan penelitian. Sumber data dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama

1.) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang berharga untuk penelitian yang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang asli, akurat, dan mendalam. Data ini diperoleh dari sumber asli yaitu, informan ataupun responden yang terkait dengan penelitian (Rukhmana, 2021). Pada penelitian pengendalian pembangunan proyek IPAL ini, penulis akan melakukan survei, wawancara untuk mendapatkan data yang konkrit dan akurat yang akan dilakukan di BPPW Jambi.

2.) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (Rukhmana, 2021). Sumber data sekunder dapat ditemukan dalam arsip, skripsi, jurnal terkait penelitian, dan dokumen yang ada pada BPPW Jambi. Selain itu, data juga dapat diperoleh dari berita dan sumber lainnya yang relevan.

1. 7. 5. Teknik Penentuan Informan

Informan adalah individu yang memberikan informasi kepada peneliti dalam sebuah penelitian. Pemilihan informan yang tepat sangat penting untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan dengan tujuan penelitian. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menentukan Informan, namun teknik yang akan diterapkan yaitu Teknik *Purposive Sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pemilihan informan dengan pertimbangan tertentu, yaitu berdasarkan karakteristik yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian (Lenaini, 2021).

Peneliti juga menggunakan teknik *Snowball Sampling*. Teknik *Snowball Sampling* adalah metoda *sampling* di mana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya, biasanya metoda ini digunakan untuk menjelaskan pola-pola sosial atau komunikasi (sosiometrik) suatu komunitas tertentu. Untuk dapat menemukan sampel yang sulit diakses, atau untuk memperoleh informasi dari responden mengenai permasalahan yang spesifik atau tidak jelas terlihat di dunia nyata, maka teknik *sampling snowball* merupakan salah satu cara yang dapat diandalkan dan sangat bermanfaat dalam menemukan responden yang dimaksud sebagai sasaran penelitian melalui keterkaitan hubungan

dalam suatu jaringan, sehingga tercapai jumlah sampel yang dibutuhkan. (Nurdiani, 2014)

Tabel 1. 1. Informan Penelitian

Keterangan	Status
PPK Sanitasi Balai Prasarana Permukiman Wilayah	Informan Kunci
Staff Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi	Informan Pendukung
Asisten Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Jambi	Informan Pendukung
Masyarakat terdampak Kelurahan Rajawali	Informan Pendukung

Sumber: data diolah peneliti

1. 7. 6. Teknik Pengumpulan Data

Pemilihan teknik pengumpulan data yang tepat merupakan faktor penting dalam penelitian untuk mendapatkan data yang akurat, relevan, dan dapat diandalkan. Djaman Satori dan Aan Komariah (2011) mendefinisikan teknik pengumpulan data sebagai prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ilmiah. Ini menunjukkan bahwa pengumpulan data harus dilakukan dengan cara yang terencana dan terstruktur agar hasilnya valid dan dapat diandalkan. Pemilihan teknik yang tepat tergantung pada jenis penelitian, tujuan penelitian, dan sifat data yang ingin dikumpulkan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan teknik wawancara, studi kepustakaan, observasi dan dokumentasi untuk mengumpulkan data-data sebagai penguat penelitian.

1) Wawancara

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Keunggulan teknik ini mampu untuk memperoleh informasi dan mendalami informasi yang sudah ada dengan berbagai sudut pandang. Teknik ini bisa dilakukan secara tatap muka langsung maupun *online*. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan percakapan langsung antara pewawancara dan responden, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan dan responden memberikan jawaban (Noerhadi, 2016).

2) Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu objek, peristiwa, atau fenomena. Ini merupakan metode pengumpulan data yang penting dalam berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, penelitian sosial, dan pendidikan. Observasi merupakan suatu pengamatan atau teknik yang dilakukan dengan mengadakan suatu pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis (Khaatimah & Wibawa, 2017).

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan informasi dalam bentuk dokumen. Dokumen yang dimaksud dapat berupa teks, gambar, audio, video ataupun format lainnya. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi untuk membuktikan kebenaran untuk mendukung suatu fakta ataupun pernyataan.

1. 7. 7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses yang dilakukan untuk mengolah, menata, memahami, dan mencari informasi penting dari kumpulan data yang diperoleh dalam penelitian. Miles dan Huberman mengklasifikasikan teknik analisis data kualitatif menjadi tiga kategori utama:

1) Reduksi Data

Banyaknya data yang dikumpulkan di lapangan, sehingga perlu dicatat secara rinci dan teliti. Semakin banyak waktu dihabiskan oleh seorang peneliti di lapangan, maka jumlah data yang diperlukan akan semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih informasi paling penting, memfokuskan pada hal-hal penting dan mencari tema serta polanya. (Fiantika et al., 2020)

2) Penyajian Data

Penyajian data pada penelitian kualitatif yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif (Fiantika et al., 2020). Dengan adanya penyajian data, maka dapat mempermudah dan memahami apa yang terjadi. Selain itu, Miles dan Huberman dalam buku Feny mengusulkan agar data dapat ditampilkan dengan menggunakan grafik, matriks, *network* (jejaring kerja), dan *chart* selain dengan teks yang bersifat naratif (Fiantika et al., 2020)

3) Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman dalam buku Feny, penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah ketiga dalam analisis data penelitian kualitatif (Fiantika et al., 2020). Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan dapat

dimodifikasi jika tidak ditemukan bukti substansial yang dapat mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, temuan pada tahap awal dianggap dapat dipercaya jika didukung oleh bukti yang dapat diandalkan dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data lebih lanjut.

1. 7. 8. Keabsahan Data

Validasi data membantu data dan informasi yang diperoleh, menunjukkan bahwa semua data dan informasi telah diperoleh melalui observasi dan penelitian untuk memberikan informasi yang akurat. Data yang dilaporkan harus diverifikasi dan dianalisis. Peneliti menggunakan sumber data, metode, peneliti, dan teori untuk mengevaluasi validitas data. (Fiantika et al., 2020). Dalam penelitian ini, triangulasi yang akan digunakan yaitu triangulasi sumber data, yaitu dengan mengecek validitas data dengan menggunakan teknik pengumpulan dan sumber data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi.

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1. Deskripsi atau Gambaran Umum Kota Jambi

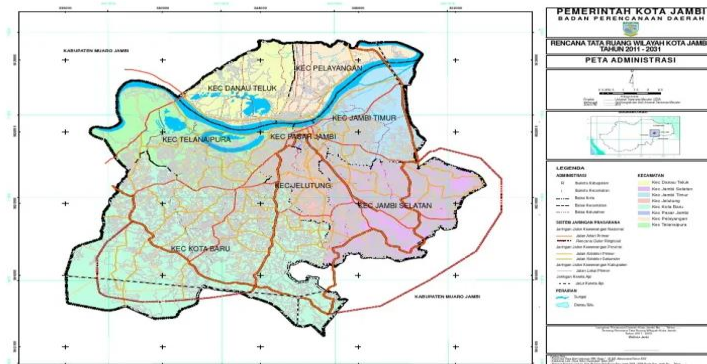
2. 1. 1. Profil Singkat dan Sejarah Kota Jambi

Jambi sebagai daerah permukiman penduduk bahkan sebagai pusat kedudukan pemerintahan telah berjalan dari masa ke masa. Sejarah Dinasti Sung menjelaskan bahwa Maharaja San-fo-tsi (Swarnabhumi) bersemayam di Chan-pi (Jambi). Dengan demikian Chan-pi atau Jambi sudah ada dan dikenal pada abad ke 9M. Sebutan Jambe yang berasal dari bahasa Jawa (Sunda) yang berarti Pinang, dari situ lah asal usul sebutan Jambe menjadi nama Jambi di abad ke 15 dimana pada masa Putri Selero Pinang Masak memerintah kerajaan Jambi di tahun 1460-1480 (Jambikota.go.id, 2022).

Istana yang dibangun di Bukit Tanah Pilih yang terakhir sebagai tempat Sultan Thaha Saifuddin dilahirkan dan dilantik sebagai Sultan pada tahun 1855. Kemudian, dibumi hanguskan sendiri oleh Sultan Thaha pada tahun 1858. Pada tahun 1855, Sulthan Thaha Saifuddin Dari puing-puing Istana Tanah Pilih, oleh Belanda dikuasai dan dijadikan markas. Setelah Sulthan Thaha Saifuddin gugur pada 27 April 1904, Belanda secara utuh menempatkan wilayah kerajaan Jambi sebagai bagian wilayah kekuasaannya. Setelah Jambi berada di kekuasaan Kolonial Hindia Belanda dan berstatus *Under Afdeling* kemudian ditingkatkan sebagai *Afdeling*. Pada Tahun 1908 *Afdeling* Jambi berubah menjadi Keresidenan Jambi dibawah O. L. Helfrich sampai masa kemerdekaan. Pasca kemerdekaannya, Kota Jambi diakui pemerintahan ditetapkan dengan ketetapan Gubernur Sumatera No.

103 tahun 1946 pada tanggal 17 Mei 1946 dengan sebutan Kota Besar dan Walikota pertamanya bernama Makalam.

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kota Jambi



Sumber: Pemerintah Kota Jambi

2. 1. 2. Keadaan Geografis Kota Jambi

Kota Jambi yang merupakan Ibukota dari Provinsi Jambi memiliki luas wilayah kurang lebih sebesar 205,38km². Wilayah Kota Jambi terletak pada ketinggian yang relatif rendah yaitu 10-60 meter di atas permukaan laut dan wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi (Localisedgs-indonesia.org, n.d.). Secara Geografis, Kota Jambi terletak pada 103040'1,67"-103040'0,22" Bujur Timur dan 1030'2,98"-1040'1,07" Lintang Selatan (Jambikota.go.id, 2022). Secara administratif, kota ini terbagi menjadi 11 kecamatan dan 68 kelurahan (Priyanti, 2023), yaitu:

Tabel 2. 1 Kecamatan Kota Jambi

Kecamatan	Kelurahan
1. Danau Teluk	- Kelurahan Pasir Panjang - Kelurahan Tanjung Raden

Kecamatan	Kelurahan
	- Kelurahan Tanjung Pasir - Kelurahan Olak Kemang - Kelurahan Ulu Gedong
2. Pelayangan	- Kelurahan Tengah - Kelurahan Ilmu - Kelurahan Mudung Laut - Kelurahan Arab Melayu - Kelurahan Tahtul Yaman - Kelurahan Tanjung Johor
3. Jambi Timur	- Kelurahan Sijenjang - Kelurahan Kasang Jaya - Kelurahan Talang Banjar - Kelurahan Budiman - Kelurahan Sulanjana - Kelurahan Kasang - Kelurahan Tanjungsari - Kelurahan Rajawali - Kelurahan Tanjung Pinang
4. Danau Sipin	- Kelurahan Sungai Putri - Kelurahan Murni - Kelurahan Solok Sipin - Kelurahan Selamat - Kelurahan Legok
5. Jambi Selatan	- Kelurahan Pasir Putih - Kelurahan Tambak Sari - Kelurahan The Hok - Kelurahan Wijayapura - Kelurahan Pakuan Baru
6. Alam Barajo	- Kelurahan Kenali Besar - Kelurahan Rawasari - Kelurahan Beliung - Kelurahan Mayang Mangurai - Kelurahan Bagan Pete - Kelurahan Simpang Rimbo - Kelurahan Pinang Merah
7. Jelutung	- Kelurahan Jelutung - Kelurahan Kebun Handil - Kelurahan Talang Jauh - Kelurahan Lebak Bandung - Kelurahan Payo Lebar - Kelurahan Handil Jaya - Kelurahan Cempaka Putih
8. Kota Baru	- Kelurahan Suka Karya - Kelurahan Simpang III Sipin - Kelurahan Paal Lima

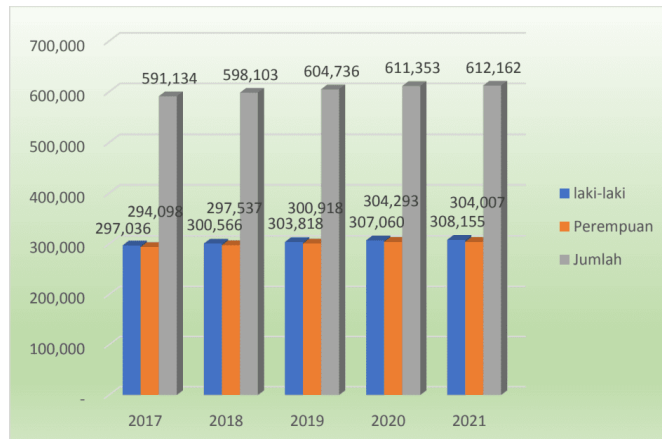
Kecamatan	Kelurahan
	- Kelurahan Kenali Asam Bawah - Kelurahan Kenali Asam Atas - Kelurahan Talang Gulo - Kelurahan Kenali Asam
9. Paal Merah	- Kelurahan Talang Bakung - Kelurahan Payo Selincah - Kelurahan Eka Jaya - Kelurahan Lingkar Selatan - Kelurahan Paal Merah - Kelurahan Bakung Jaya
10. Pasar Jambi	- Kelurahan Pasar Jambi - Kelurahan Beringin - Kelurahan Sungai Asam - Kelurahan Orang Kayo Hitam
11. Telanaipura	- Kelurahan Simpang IV Sipin - Kelurahan Buluran Kenali - Kelurahan Teluk Kenali - Kelurahan Telanaipura - Kelurahan Penyengat Rendah - Kelurahan Pematang Sulur - Kelurahan Aur Kenali

Sumber: www.metrojambi.com dan diolah oleh peneliti

2. 1. 3. Kondisi Demografi Kota Jambi

Perkembangan penduduk Kota Jambi dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2017, penduduk Kota Jambi adalah 591.134 jiwa dan terus meningkat menjadi 612.162 jiwa di tahun 2021. Pertumbuhan penduduk setiap tahun dalam kurun 2017-2021 berkisar antara 0,13% sampai dengan 1,31% pertahunnya dengan angka pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0.963% (Jambikota.go.id, 2022b).

Gambar 2. 1 Demografi penduduk Kota Jambi



Sumber: www.jambikota.go.id

2. 2. Deskripsi atau Gambaran Umum Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi

2. 2. 1. Profil Singkat Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi

Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya. BPPW dibentuk melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2016 mengenai organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis di Kementerian PUPR. Sebelum terbentuknya BPPW, pengelolaan infrastruktur permukiman dilakukan secara terpisah oleh berbagai unit kerja, dari; (1) Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi, (2) Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan, (3) Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase-2 (NUSSP-2)*. Reorganisasi itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, memperkuat koordinasi, mengoptimalkan pembangunan sumber daya dan mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman di daerah. BPPW memiliki peran strategis

dalam mendukung pembangunan wilayah, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dasar yang layak, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

2. 2. 2. Visi dan Misi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi

- Visi

Memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan wilayah, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dasar yang layak, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

- Misi

1. Mendukung pembangunan infrastruktur permukiman yang layak, sehat, dan berkelanjutan.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman, termasuk kawasan kumuh dan perdesaan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang infrastruktur permukiman melalui pengelolaan yang efektif dan efisien.

2. 2. 3. Tugas dan Fungsi Balai Prasarana Permukiman Wilayah

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Kementerian PUPR Pasal 131 menerangkan bahwa Balai Prasarana Permukiman Wilayah mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyiapan teknis, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi

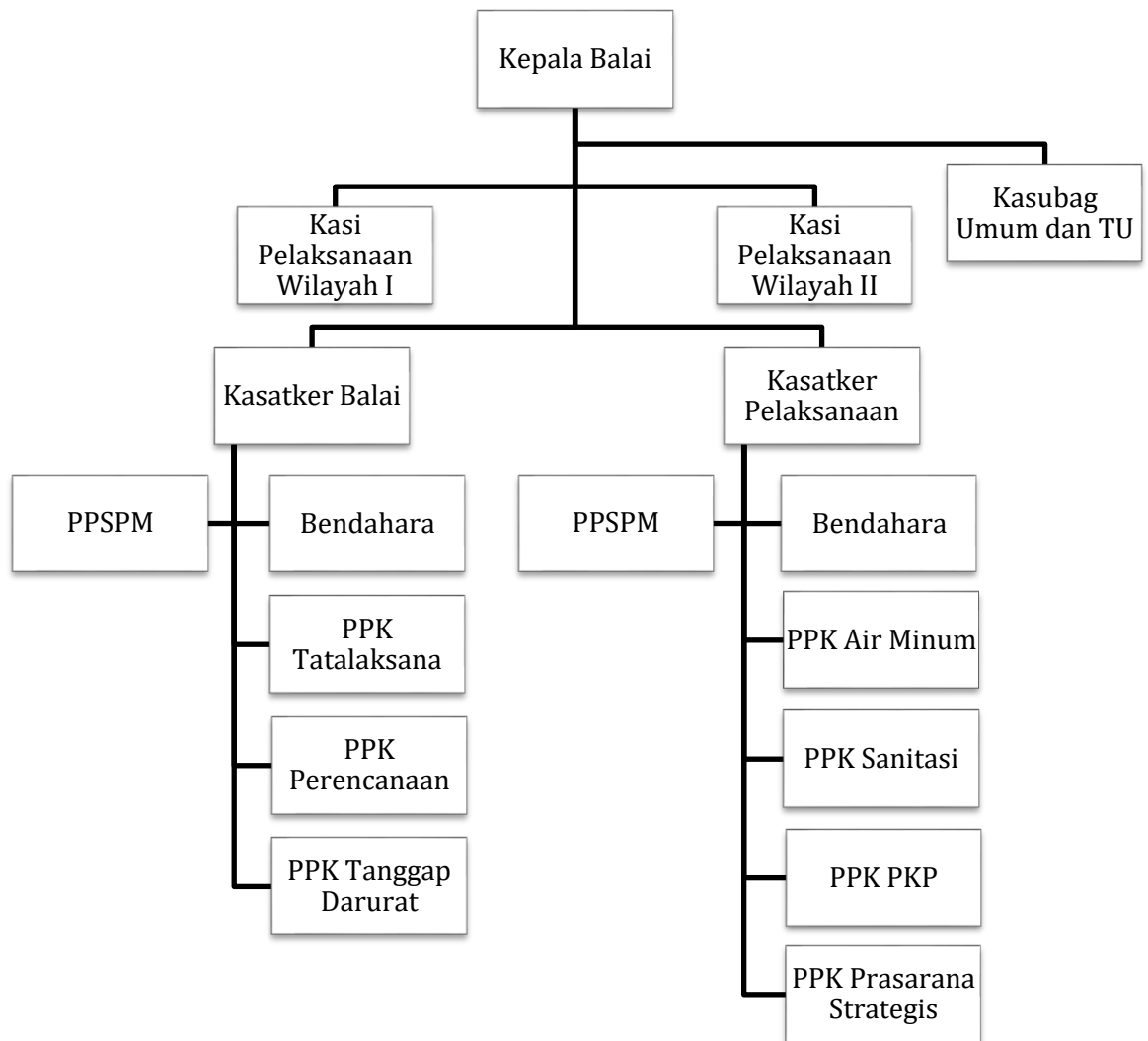
pembangunan sarana dan prasarana permukiman, pengelolaan informasi pelaksanaan pembangunan permukiman, penanggulangan pasca bencana dan fasilitasi serah terima aset. Fungsi dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah diatur pada Pasal 132, yaitu:

- a) Penyusunan rencana teknis, program, dan anggaran pembangunan sarana dan prasarana permukiman;
- b) Penyiapan analisis teknis dan evaluasi terhadap kelayakan program pembangunan sarana dan prasarana permukiman;
- c) Pelaksanaan, pengendalian teknis, dan pengawasan pembangunan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, dan pengembangan sarana prasarana strategis;
- d) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana permukiman;
- e) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan aset pembangunan sarana dan prasarana permukiman sampai dengan serah terima aset;
- f) Fasilitasi penyampaian usulan daerah dan koordinasi pemangku kepentingan bidang pembangunan sarana dan prasarana permukiman;
- g) Fasilitasi pengadaan lahan dan serah terima aset;
- h) Fasilitasi pengelolaan rumah negara;
- i) Pengelolaan tanggap darurat dan pelaksanaan dukungan penanggulangan pasca bencana serta kerusuhan sosial;

- j) Pemberdayaan masyarakat bidang pembangunan sarana dan prasarana permukiman;
- k) Pelaksanaan penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi;
- l) Pengelolaan sistem informasi bidang pembangunan sarana dan prasarana permukiman; dan
- m) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

2. 2. 4. Struktur Organisasi Balai Prasarana Permukiman Wilayah

Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia. Untuk menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien, BPPW memiliki struktur organisasi yang terorganisasi dengan baik dan terdiri dari beberapa bagian yang saling mendukung. Struktur organisasi BPPW dirancang untuk memastikan pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara terkoordinasi dan sesuai dengan visi serta misi Kementerian PUPR. Dalam menjalankan tugas, Kepala Balai dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha. Dibawah Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha terdapat Kasi Pelaksanaan Wilayah I dan Kasi Pelaksanaan Wilayah II. Untuk menjalankan tugas pokok secara teknis dibantu oleh Kasatker Balai dan Kasatker Pelaksanaan. Pada Kasatker Balai, terdiri dari PPSPM, PPK Tata Laksana, PPK Perencanaan dan PPK Tanggap Darurat. Sedangkan, di Kasatker Pelaksanaan terdiri dari PPSPM, PPK Air Minum, PPK Sanitasi, PPK PKP dan PPK Prasarana Strategis.



Sumber: Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3. 1. Pengendalian Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi dalam Proyek IPAL di Kota Jambi

Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan dengan segala ketentuan dan tujuan awal. Pengendalian dalam keberlangsungan proyek IPAL sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proyek berjalan dengan perencanaan awal dan menghindari ketimpangan yang dapat menghambat jalannya proyek. Pengendalian dalam proyek IPAL menjadi tanggung jawab dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi khususnya pada Unit Sanitasi. BPPW Jambi telah melaksanakan proyek ini sejak tahun 2021. Namun, sampai dengan tahun 2024 proyek IPAL tersebut belum selesai sepenuhnya dan menghambat aktivitas pengguna jalan di daerah Kecamatan Jambi Timur dan Kecamatan Pasar.

Guna melihat pembangunan proyek IPAL melalui pengendalian BPPW terhadap proyek IPAL di Kota Jambi, maka dianalisis menggunakan Teori Pengendalian dari Robbins dan Coulter yang berisikan empat indikator yaitu Penetapan Standar, Pengukuran, Membandingkan dan Melakukan Tindakan.

3. 1. 1. Penetapan Standar

Penetapan standar merupakan aktivitas yang sudah ditetapkan pada saat perencanaan dan merupakan target yang akan menjadi acuan perbandingan untuk kinerja (Robbins & Coulter, 2012). Untuk memastikan alur kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dibutuhkan pedoman pelaksanaan berupa Standar

Operasional Prosedur (SOP). Standar Operasional Prosedur merupakan dokumen yang menjabarkan aktivitas operasional yang dilaksanakan secara benar, tepat, dan konsisten untuk menghasilkan produk sesuai standar yang telah ditetapkan sebelumnya (Suryani & et al, 2023). Dalam pembangunan proyek IPAL, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi menggunakan Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya No. 8 Tahun 2022 sebagai pedoman SOP. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Neiklen Rifen Kasongkahe selaku PPK Sanitasi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi

“Untuk mengendalikan pembangunan proyek IPAL, kami tidak mempunyai SOP khusus. Namun, kami memakai Surat Edaran DJCK No. 8 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR untuk menjadi pedoman pekerjaan kami”. (Hasil wawancara dengan Bapak Neiklen Rifen Kasongkahe, ST. MT., selaku PPK Sanitasi pada tanggal 14 Februari 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengendalian proyek, BPPW tidak memiliki SOP yang secara khusus disusun dan diterapkan pada proyek IPAL. Sebagai gantinya, BPPW mengacu pada Surat Edaran DJCK No. 8 Tahun 2022 sebagai pedoman kerja. Penggunaan surat edaran nasional merupakan pemenuhan terhadap standar normatif, namun belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan operasional di lapangan. Ketiadaan SOP khusus pada proyek IPAL menyebabkan tidak terdapatnya standar kinerja yang bersifat detail dan disesuaikan dengan kondisi proyek. Hal ini dapat menyulitkan proses pengukuran kinerja aktual karena tidak adanya pedoman yang baku. Selanjutnya, perbandingan kinerja aktual dengan standar juga menjadi tidak optimal. Surat Edaran yang bersifat umum dan tidak menyediakan tolak ukur rinci yang dapat digunakan secara

langsung dalam evaluasi mingguan proyek. Berikut dengan pengambilan tindakan korektif juga berisiko tidak konsisten karena tidak ada acuan mengenai langkah-langkah koreksi, batas toleransi deviasi maupun prosedur tindak lanjut.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa dalam pengendalian pembangunan proyek IPAL, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus yang dirancang sesuai kebutuhan spesifik proyek tersebut. Sebagai gantinya, institusi ini menggunakan Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya No. 8 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR sebagai pedoman kerja. Meskipun penggunaan surat edaran ini menunjukkan kepatuhan terhadap standar normatif nasional, namun hal tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan operasional di lapangan. Ketiadaan SOP yang khusus disesuaikan dengan karakteristik proyek IPAL mengakibatkan tidak adanya standar kinerja yang detail dan kontekstual, sehingga menyulitkan proses pengukuran kinerja aktual, perbandingan dengan standar, serta pengambilan tindakan korektif yang konsisten. Surat Edaran yang bersifat umum tidak menyediakan tolok ukur rinci yang dapat diaplikasikan secara langsung dalam evaluasi proyek, termasuk batas toleransi deviasi dan prosedur tindak lanjut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator penetapan standar dalam proyek IPAL belum terpenuhi secara optimal, dan diperlukan pengembangan SOP khusus yang dapat berfungsi sebagai alat bantu teknis untuk menerjemahkan regulasi nasional ke dalam prosedur kerja yang terukur dan dapat diterapkan secara konsisten.

3. 1. 2. Pengukuran

Pengukuran kinerja merupakan tahap penting dalam proses pengendalian manajerial yang bertujuan untuk memperoleh data aktual sebagai dasar evaluasi pencapaian tujuan organisasi. Robbins dan Coulter (2012) menyatakan bahwa pengukuran kinerja melibatkan penentuan kinerja aktual, yaitu langkah bagi manajer untuk mengumpulkan informasi yang mencerminkan seberapa baik organisasi atau unit tertentu dalam mencapai tujuannya. Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jambi memiliki peran strategis dalam pengukuran pembangunan proyek-proyek sanitasi seperti proyek IPAL.

Untuk menilai efektivitas kerja BPPW, pengukuran kinerja dilakukan sebanyak 2 minggu sekali melalui *weekly meeting* atau pertemuan mingguan. Dari pertemuan mingguan tersebut, dapat ditemukan berbagai deviasi atau kendala yang terjadi saat proses pembangunan berlangsung. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan antara rencana awal dengan kondisi aktual, dimana kondisi tanah telah diperhitungkan tetapi beberapa area memiliki karakteristik tanah yang berbeda dari studi awal, menyebabkan beberapa pipa mengalami penurunan atau perlu penyesuaian metode pemasangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran awal mengenai kondisi geoteknikal masih perlu ditingkatkan agar lebih akurat dalam memprediksi resiko.

Tabel 3. 1 Hasil Survei SR April 2023

Berminat Sudah Terpasang	151 SR
Berminat Belum Terpasang	24 SR
Tidak Berminat	246 SR
Tidak Memenuhi Syarat	112 SR
Izin Pemilik Properti	283 SR

Sumber: Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi

Selain itu, kendala non teknis, seperti kurangnya sosialisasi kepada warga dan dampak proyek terhadap akses jalan dan aktivitas sehari-hari, menyebabkan munculnya penolakan terhadap proyek. Terbukti dengan kurangnya pemahaman warga tentang pembangunan proyek IPAL, target awal pembangunan Sambungan Rumah (SR) sebanyak 1000 sambungan yang terdiri dari sambungan komersial dan non komersial, hanya 151 rumah yang sudah terpasang pipa sambungan rumah pada April 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran terhadap kesiapan masyarakat dalam menerima proyek kurang tepat sehingga menyebabkan kendala sosial yang berpotensi untuk menghambat jalannya proyek.

Pembahasan mengenai kendala pembangunan proyek dibahas pada *Minutes of Meeting* (MoM) atau evaluasi mingguan yang dilakukan secara periodik 2 minggu sekali selama periode proyek IPAL masih berlangsung oleh BPPW dan kontraktor. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Neiklen Rifen Kasongkahe, ST, MT. selaku PPK Sanitasi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi

“Dalam memprediksi aspek yang membutuhkan perhatian lebih, kami menggunakan sistem yang disebut profil resiko. Kami mengadakan pembahasan mengenai kendala yang terjadi di lapangan biasanya selama 2 minggu sekali bersama dengan kontraktor dan konsultan proyek IPAL”. (Hasil wawancara dengan Bapak Neiklen Rifen Kasongkahe, ST., MT.

selaku PPK Sanitasi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi pada 14 Februari 2025)

Gambar 3. 1 Dokumentasi *Minutes of Meeting*



Sumber: Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pengendalian proyek oleh BPPW menggunakan profil resiko sebagai alat evaluasi menunjukkan pendekatan yang objektif dalam mengukur. Kemudian, akurasi dalam pengukuran kinerja sangat bergantung pada keterlibatan berbagai sumber data, termasuk observasi langsung di lapangan serta wawancara dengan masyarakat sekitar yang terkena dampak proyek. Meskipun masalah telah tercatat dalam laporan teknis, tanpa inspeksi langsung, potensi perubahan kondisi tanah akibat cuaca kemungkinan tidak terdeteksi dan dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian konstruksi. Proyek IPAL yang awalnya ditargetkan selesai pada tahun 2023, mengalami keterlambatan akibat permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga jadwal penyelesaiannya harus mengalami penyesuaian. Pada April 2024, progres proyek sudah mencapai sekitar 90% dan beberapa telah dilakukan rekondisi lapis aspal. Dengan berbagai kendala tersebut, proyek IPAL Kota Jambi

memerlukan strategi yang lebih adaptif dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Penerapan sistem yang lebih adaptif menjadi kunci utama dalam memastikan proyek IPAL dapat mencapai tujuannya.

Gambar 3. 2 Perbaikan kondisi lapis aspal
DEFFECT 3 : PENGEMBALIAN KONDISI LAPIS ASPAL AC-WC

POSISI MH/SPAN	LOKASI	DOKUMENTASI SEBELUM	DOKUMENTASI SESUDAH	STATUS
CO.D22W - D25W	Jl. Dr Cipto Mangunkusumo			CLOSE
CO.D22W - D.25W	Jl. Dr Cipto Mangunkusumo			CLOSE

Sumber: Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi

Berdasarkan analisis mengenai indikator pengukuran kinerja aktual BPPW pada proyek IPAL, pengukuran dalam proyek IPAL menjadi aspek krusial dalam memastikan bahwa setiap tahap pelaksanaan berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan. Meskipun BPPW telah menggunakan sistem *weekly meeting* sebagai cara untuk mengetahui ketimpangan, hasil lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara rencana awal dengan implementasi, terutama dalam hal prediksi geoteknikal, keterlambatan konstruksi serta penerimaan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa pengukuran kinerja proyek tidak hanya bergantung pada laporan internal, tetapi memerlukan inspeksi langsung dan keterlibatan berbagai pihak agar data yang diperoleh lebih akurat dan langkah yang diambil lebih tepat.

3. 1. 3. Membandingkan

Indikator perbandingan menjadi salah satu metode penting untuk menilai efektivitas keberhasilan proyek IPAL Kota Jambi. Perbandingan dalam pengendalian manajemen merupakan proses membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah terjadi penyimpangan atau tidak (Robbins & Coulter, 2012). Pada tahap perbandingan, kinerja aktual dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Proses ini membantu BPPW mengidentifikasi apakah berada diatas atau dibawah standar. Untuk mengetahui fakta yang terjadi di lapangan, BPPW melakukan pertemuan mingguan atau *weekly meeting* setiap dua minggu sekali sebagai sesi membandingkan perkembangan proyek dengan rencana awal, serta mengidentifikasi kendala yang terjadi di lapangan.

“BPPW melakukan weekly meeting yang dilakukan kurang lebih sebanyak 2 minggu sekali. Membahas mengenai perkembangan maupun kendala proyek yang melibatkan BPPW dan kontraktor.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Neiklen Rifen Kasongkahe, ST., MT. selaku PPK Sanitasi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi pada 14 Februari 2025)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme *weekly meeting* yang dilakukan BPPW telah mencerminkan prinsip indikator perbandingan untuk menilai kesesuaian antara standar yang ditetapkan dan kinerja aktual. Evaluasi secara berkala untuk pemantauan perkembangan proyek, membandingkan antara standar dan implementasi di lapangan dan melakukan koreksi jika ditemukan penyimpangan. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi melaksanakan pengendalian proyek IPAL melakukan *weekly meeting* sebagai cara mengendalikan alur proyek. Namun, tidak terdapatnya Standar Operasional

Prosedur (SOP) khusus yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengendalian proyek. Ketidakjelasan SOP berpotensi tidak optimalnya pelaksanaan pengendalian karena tidak terdapat tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan sehingga efektivitas dalam mengatasi permasalahan proyek menjadi sulit diketahui. Hal ini menunjukkan terdapat tantangan yang dihadapi oleh BPPW Jambi dalam proses pembangunan dan menyebabkan keterlambatan penyelesaian proyek.

Tabel 3. 2 Realisasi Pekerjaan Kontraktor

No	Uraian Pekerjaan	Presentase	Realisasi
1.	Biaya Umum	3,29%	3,22%
2.	Pek. Pengadaan Pipa	7,57%	6,99%
3.	Pek. Pemasangan Pipa Open Trench	12,86%	12,04%
4.	Pek. Pemasangan Pipa PVC Jacking	37,91%	4,54%
5.	Pek. Pemasangan Pipa RCP Jacking	26,01%	7,34%
6.	Pek. Drop MH, Clean Out, Dry Connection	2,42%	0,89%
7.	Pekerjaan Pump Station	9,47%	4,53%
8.	Pekerjaan Jalan Akses ke WWTP	0,87%	0%
Total		100%	39,55%

Sumber: Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa realisasi pekerjaan kontraktor sampai dengan minggu 114 periode s/d 20 Januari 2023 adalah sebesar 39,55% dengan rencana 39,72% dan deviasi sebesar -0,17%. Meskipun BPPW telah melakukan pengendalian melalui sistem *weekly meeting* yang dilaksanakan 2 minggu sekali, kenyataannya masih terdapat selisih antara rencana dan capaian aktual. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan rutin belum sepenuhnya mampu menekan angka deviasi progress pekerjaan. Walaupun angkanya relatif kecil, tidak menutup kemungkinan indikator adanya hambatan teknis di lapangan yang perlu segera diidentifikasi dan diberi tindakan.

Di sisi lain, masyarakat Kelurahan Rajawali yang terdampak langsung oleh pelaksanaan proyek IPAL Kota Jambi, telah menerima sosialisasi awal yang menyampaikan sejumlah informasi mengenai manfaat, tahapan pekerjaan serta dampak yang mungkin terjadi. Perencanaan awal disampaikan proyek dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menjaga kualitas air tanah dan air permukaan, serta membantu mengentaskan permasalahan masyarakat terkait dengan Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Namun antara rencana yang dijanjikan dengan fakta aktual yang terjadi di lapangan, masyarakat mengungkapkan perbedaan yang cukup terlihat. Hal ini disampaikan oleh Ibu Lisa selaku masyarakat Kelurahan Rajawali yang menyampaikan bahwa:

“Pada saat sosialisasi, kami diberi pemahaman bahwa proyek IPAL ini adalah proyek yang cukup yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan dan kami diminta untuk mendukung proyek tersebut. Namun, setelah proyek berjalan, yang kami alami agak berbeda dengan yang kami harapkan. Selama beberapa minggu, jalan di lingkungan kami terganggu karena galian pipa dan genangan air yang muncul akibat pengerjaan yang belum selesai rapi. Beberapa warga juga belum sepenuhnya terhubung dengan sistem IPAL. Jadi, dari hasilnya, kami merasa belum sepenuhnya mendapatkan manfaat langsung seperti yang disampaikan di awal.” (Hasil Wawancara dengan Ibu Lisa selaku Masyarakat Kelurahan Rajawali pada 11 Maret 2025)

Berdasarkan wawancara tersebut, menunjukkan adanya ketimpangan antara perencanaan awal proyek IPAL dan hasil aktual yg dirasakan masyarakat. Kendala yang dialami masyarakat yang terkait dengan gangguan lalu lintas, genangan air yang sering terjadi saat musim hujan dan sebagian warga belum terhubung ke sistem IPAL menunjukkan realisasi pekerjaan tidak sepenuhnya sejalan dengan rencana yang disampaikan sehingga mengindikasikan adanya deviasi antara progres fisik proyek dan manfaat yang dijanjikan. Akibat dari ketidaksesuaian

tersebut, muncul kesan bahwa proyek belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal ini penting karena persepsi warga mengenai keberhasilan proyek tidak hanya diukur oleh keberadaan infrastruktur, tetapi juga oleh fungsi dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.

Gambar 3. 3. Galian Proyek IPAL



Sumber: minangsatu.com

Berdasarkan temuan dan tanggapan masyarakat, masih terlihat adanya kesenjangan antara apa yang disosialisasikan di awal proyek dengan realitas yang mereka alami. Masyarakat mengharapkan manfaat langsung dari proyek ini, seperti peningkatan sanitasi dan lingkungan yang lebih bersih. Namun, yang terjadi justru munculnya gangguan sementara, seperti akses jalan yang terganggu dan belum meratanya sambungan ke sistem IPAL. Hal ini menunjukkan bahwa proses membandingkan dengan mekanisme *weekly meeting* belum secara optimal dijalankan. Evaluasi proyek dari BPPW sebaiknya tidak berfokus pada capaian fisik atau administratif, tetapi juga dampak nyata dan persepsi masyarakat sebagai penerima manfaat langsung. Demikian, dapat disimpulkan bahwa pengendalian

yang dilakukan oleh BPPW melalui *weekly meeting* perlu ditunjang oleh mekanisme *crosscheck* ke lapangan secara berkala, pelaporan yang lebih transparan, dan meninjau kembali kesesuaian antara target awal dengan hasil yang tercapai, agar deviasi tidak berkembang menjadi keterlambatan yang signifikan dan proyek IPAL benar-benar memberikan manfaat yang merata dan sesuai harapan masyarakat Kota Jambi.

3. 1. 4. Tindakan Korektif

Pengambilan tindakan korektif merupakan salah satu indikator dalam teori pengendalian manajemen. Indikator ini merujuk kepada sejauh mana instansi mampu merespons penyimpangan maupun ketidaksesuaian antara rencana dan realiasi di lapangan. Tindakan korektif dilakukan apabila kinerja turun dibawah standar dan analisis menunjukkan bahwa perlu diambil tindakan (Sugiyanto, 2016). Sebagai bentuk tindak lanjut, pihak pelaksana proyek seperti BPPW bersama dengan kontraktor dan konsultan pengawas melakukan evaluasi identifikasi sumber permasalahan, baik dari sisi teknis seperti kondisi tanah yang sulit diprediksi, maupun non-teknis seperti terganggunya aktivitas warga akibat kurangnya sosialisasi. Pengambilan tindakan ini bukan hanya ditujukan untuk memperbaiki kondisi saat ini, tetapi juga sebagai bentuk komitmen terhadap penyelesaian proyek secara tepat waktu dan sesuai standar. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan BPPW terkait dengan tindakan korektif yang mereka lakukan.

“Secara berkala, evaluasi yang melibatkan pusat seperti Asian Development Bank (ADB) yang terjadi secara periodik selama 3 sampai 4 bulan sekali, tetapi, untuk evaluasi internal dilakukan sebanyak 2 minggu sekali seperti weekly meeting.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Neiklen

Rifen Kasongkahe, ST., MT. selaku PPK Sanitasi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi pada 14 Februari 2025)

Berdasarkan wawancara diatas, Balai Prasana Permukiman Wilayah Jambi melakukan 2 jenis pendekatan yaitu dengan evaluasi internal dan eksternal. Evaluasi secara ekst ernal ini bertujuan untuk melihat pencapaian proyek dari sudut pandang internasional dan memastikan bahwa implementasi proyek sesuai dengan standar dan ketentuan yang telah disepakati. Sementara itu, untuk menjaga keberlangsungan dan kendali proyek di tingkat lokal, evaluasi internal dilakukan secara lebih rutin melalui *weekly meeting* setiap dua minggu sekali. Pertemuan ini melibatkan pihak-pihak pelaksana proyek seperti BPPW, kontraktor dan konsultan pengawas, yang secara bersama-sama membahas perkembangan pekerjaan, hambatan teknis di lapangan dan strategi percepatan bila dibutuhkan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen untuk menjaga agar proyek tetap berjalan sesuai dengan perencanaan awal, namun, efektivitas dari kedua evaluasi tersebut tetap bergantung pada keakuratan data yang diambil.

Tindakan korektif yang dilakukan oleh BPPW dinilai masih belum optimal karena hanya mengandalkan laporan internal dari kontraktor tanpa terjun langsung ke lapangan untuk meninjau langsung keberlangsungan proyek. Hal ini didukung oleh hasil wawancara berikut

“Dari sudut pandang Ombudsman, mekanisme tindakan korektif yang dilakukan oleh BPPW dalam proyek IPAL belum cukup efektif. Mereka hanya mengandalkan laporan tertulis dan selain itu, untuk masyarakat yang terdampak, mereka tidak ada pengumuman publik terkait dengan pelaporan masalah yang jelas. Idealnya, mereka mencantumkan hal tersebut agar bisa menyampaikan keluhan yang dirasakan oleh masyarakat umum.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Shopian Hadi selaku Asisten Pencegahan Maladministrasi pada 20 Februari 2025)

Berdasarkan wawancara dengan Ombudsman RI Perwakilan Jambi, menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan dan evaluasi dalam proyek IPAL dinilai belum transparan dan partisipatif. Ketergantungan BPPW dalam mekanisme *weekly meeting* dan laporan tertulis menunjukkan bahwa proses evaluasi masih bersifat satu arah tanpa membuka ruang yang cukup bagi masyarakat yang terdampak untuk menyampaikan *feedback* secara langsung. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Lisa, salah satu warga Kelurahan Rajawali, menyatakan bahwa:

“Sejak pembangunan proyek IPAL dimulai, kami hanya mendapatkan sosialisasi pada tahun 2021, selanjutnya tidak ada info lebih lanjut mengenai proyek. Ketika ditanya mengenai posko aduan yang dapat diakses masyarakat saja tidak ada jawaban pastinya.” (Hasil wawancara dengan Ibu Lisa selaku warga Kelurahan Rajawali pada 11 Maret 2025)

Berdasarkan pernyataan dari Ombudsman RI dengan Ibu Lisa, menunjukkan bahwa meskipun proyek berjalan dengan pengawasan administratif dari instansi terkait, masih terdapat kelemahan dalam aspek keterbukaan informasi dan pengelolaan pengaduan publik. Maka dari itu, untuk meningkatkan kinerja BPPW dalam pengendalian proyek IPAL, BPPW perlu menyediakan mekanisme pelaporan dua arah seperti posko aduan atau kanal digital yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini bukan hanya meningkatkan legitimasi proyek di mata publik, tetapi juga mempercepat penyelesaian masalah sosial yang mungkin muncul selama proses pembangunan.

Sebagai kesimpulan, tindakan korektif yang dilakukan oleh BPPW mencerminkan upaya untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan proyek ditengah tantangan teknis maupun non teknis. BPPW secara konsisten melaksanakan *weeekly meeting* sebagai bentuk dari pengawasan dan pengendalian

proyek. Pertemuan yang digelar 2 minggu sekali membahas progres pembangunan serta hal-hal strategis lainnya. Namun, berdasarkan pengamatan di lapangan dan pernyataan dari beberapa pihak, mekanisme tersebut tidak efektif apabila tidak diiringi oleh tindak lanjut nyata di lokasi proyek. Ketergantungan pada rapat formal semata membuat respons terhadap masalah bersifat lambat dan tidak mencerminkan urgensi dari permasalahan yang sebenarnya dialami di lokasi pembangunan.

3. 2. Solusi dari kendala dalam pengerjaan proyek IPAL di Kota Jambi

Pada proses pengerjaan proyek IPAL Kota Jambi, ditemukan berbagai kendala baik dari sisi teknis dan non-teknis, seperti, keterlambatan pekerjaan, gangguan lalu lintas akibat penggalian pipa, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan terbatasnya partisipasi publik dalam proses evaluasi proyek. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan solusi strategis yang dapat membantu upaya pengendalian proyek agar pelaksanaannya tetap berjalan dengan optimal. Pada aspek teknis, kendala yang muncul adalah kondisi struktur tanah sehingga memicu gangguan teknis seperti penurunan jalan, kerusakan aspal setelah penggalian serta gemangan air di sekitar area pekerjaan. Oleh karena itu, pelaksana proyek perlu melakukan pemetaan ulang terhadap kondisi tanah, khususnya di titik-titik yang telah menunjukkan gejala kegagalan struktur atau memiliki karakteristik tanah labil. Pelaksanaan proyek perlu diarahkan ke pendekatan yang berbasis analisis resiko, dimana setiap tahapan pekerjaan dievaluasi potensi hambatannya dan disiapkan rencana mitigasi teknis secara dini. Pendekatan ini memungkinkan pelaksana proyek untuk tidak hanya bereaksi terhadap masalah, namun juga memprediksi dan mencegah kendala teknis sebelum terjadi. Dengan memperkuat aspek teknis melalui pemetaan ulang dan analisis resiko yang berkelanjutan, proyek IPAL tidak hanya akan lebih efisien dalam waktu dan anggaran, tetapi juga lebih tahan terhadap potensi kegagalan struktural yang dapat berdampak pada kepuasan masyarakat dan kualitas pembangunan.

Selanjutnya, kurangnya sinkronisasi antar pemangku kepentingan yang dapat berdampak pada lambatnya pengambilan keputusan dan tumpang tindihnya kebijakan teknis di lapangan. Proyek ini melibatkan banyak pihak dengan peran dan tanggung jawab yang saling berkaitan, seperti BPPW, kontraktor, konsultan pengawas dan Dinas PUPR Kota Jambi. Tanpa koordinasi yang solid, keputusan yang diambil berisiko menimbulkan misinterpretasi bahkan pelaksanaan yang tidak seragam. Maka dari itu, penguatan antar lembaga menjadi hal yang sangat mendesak. Tidak cukup hanya mengandalkan rapat koordinasi secara berkala, komunikasi antar pihak diperlukan untuk bersifat dinamis dan fungsional, dimana setiap permasalahan teknis yang muncul dapat segera ditindaklanjuti tanpa harus menunggu prosedur birokrasi yang panjang. Rapat koordinasi tidak seharusnya berhenti pada prosedur administratif atau formalitas laporan semata. Kegiatan tersebut harus disertai dengan verifikasi lapangan yang langsung dilakukan oleh tim teknis gabungan untuk memastikan bahwa progress proyek benar-benar sesuai dengan yang dilaporkan.

Selain itu, penguatan manajerial juga mencakup pembagian peran yang jelas dan akuntabel, sehingga setiap pihak memahami batas kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing. Jika peran antar lembaga tidak jelas, konflik kepentingan dan saling lempar tanggung jawab mungkin akan terjadi yang akhirnya dapat memperlambat progres dan menurunkan afektivitas pengendalian proyek. Dengan penguatan koordinasi yang mencakup aspek struktural, komunikasi, dan lapangan, diharapkan proses pengambilan keputusan dalam proyek IPAL dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan terukur. Hal ini akan meminimalkan keterlambatan, mempercepat

penyelesaian kendala, serta menjaga proyek agar tetap berada dalam jalur perencanaan yang telah ditetapkan.

Terakhir, dalam proyek pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti proyek IPAL, dari segi aspek sosial memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan program secara menyeluruh. Masyarakat tidak hanya penerima manfaat, tetapi juga pihak yang terdampak secara langsung selama proses konstruksi berlangsung. Oleh karena itu, sosialisai dan pelibatan masyarakat menjadi elemen yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Pelaksanaan proyek IPAL Kota Jambi menunjukkan bahwa terdapat celah dalam hal transparansi informasi dan keterlibatan warga lokal. Minimnya komunikasi dua arah menyebabkan munculnya kesalahpahaman hingga keluhan yang terlambat untuk ditindaklanjuti. Upaya untuk meningkatkan kualitas sosialisasi harus lebih dari sekedar penyampaian informasi awal. Sosialisasi perlu menjadi proses berkelanjutan yang melibatkan warga secara aktif melalui forum warga, penyediaan posko pengaduan hingga memanfaatkan media lokal dan digital untuk mempublikasikan progres secara rutin.

Dengan membuka ruang partisipasi, masyarakat tidak hanya memahami manfaat jangka panjang proyek IPAL, tetapi juga akan merasa dilibatkan dalam proses pembangunan. Hal ini penting untuk menciptakan rasa memiliki terhadap proyek, yang pada akhirnya akan mendukung kelancaran pelaksanaan serta mengurangi potensi penolakan sosial. Selain itu, penting juga untuk memperkuat tindak lanjut dari hasil evaluasi agar menghasilkan tindakan korektif yang konkret

dan terukur. Setiap deviasi antara target perencanaan dan hasil aktual harus segera dianalisis penyebab dan direspon dengan strategi pemulihan yang disepakati lintas pihak. Dengan demikian, penguatan pada aspek sosial dan evaluasi pengendalian yang inklusif akan membentuk ekosistem pelaksanaan proyek yang tidak hanya berorientasi pada keberhasilan teknis, tetapi juga keberlanjutan manfaat jangka panjangnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4. 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pengendalian pembangunan proyek IPAL Kota Jambi yang dilakukan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jambi, dapat diketahui bahwa proses pengendalian yang dilakukan telah menunjukkan upaya ke arah pelaksanaan fungsi manajerial sesuai dengan tahapan pengendalian menurut Robbins dan Coulter, yaitu: penetapan standar, pengukuran kinerja, perbandingan hasil aktual dengan standar, serta pengambilan tindakan korektif. Pada indikator penetapan standar, BPPW menggunakan Surat Edaran DJCK No. 8 Tahun 2022 sebagai dasar regulatif, namun belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) internal yang spesifik untuk proyek IPAL. Hal ini membuat standar operasional bersifat umum dan kurang adaptif terhadap kondisi proyek di Kota Jambi.

Kemudian, dalam indikator pengukuran kinerja, BPPW telah melakukan pelaporan secara berkala dan melibatkan tim pengawas. Namun, indikator kinerja belum sepenuhnya terdokumentasi secara sistematis dan terukur, sehingga pengukuran cenderung bersifat administratif. Pada tahapan indikator perbandingan dilakukan evaluasi melalui rapat teknis dan laporan lapangan. Namun, karena belum ada SOP rinci dan indikator kinerja yang baku, proses perbandingan ini masih bergantung pada interpretasi subjektif yang tidak sepenuhnya berbasis indikator kuantitatif yang terukur. Sementara itu, tindakan korektif yang telah

dilakukan BPPW setiap ditemukan deviasi hanya bersifat responsif, bukan preventif, karena tidak didasari oleh sistem evaluasi yang kuat sejak awal. Maka dari hasil penelitian meskipun dilakukan pengendalian oleh BPPW sudah berjalan secara fungsional dan mengikuti struktur umum pengendalian manajemen, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Ketiadaan SOP internal, kurangnya sistem pemantauan berbasis data real-time, serta minimnya pelibatan masyarakat menjadi kelemahan yang perlu dibenahi. Pengendalian proyek seharusnya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis, fleksibel, dan kontekstual terhadap tantangan lokal di lapangan.

Demikian, dapat disimpulkan bahwa pengendalian proyek IPAL oleh BPPW belum sepenuhnya sesuai dengan teori pengendalian Robbins dan Coulter secara menyeluruh, khususnya dalam aspek struktur sistematis dan penguatan evaluasi berbasis indikator kinerja. Maka diperlukan penyempurnaan sebagai bentuk upaya atau tindakan yang dilakukan untuk memberikan solusi. Hal ini dilakukan dalam bentuk pengembangan SOP teknis internal, sistem pemantauan yang lebih terukur, dan peningkatan komunikasi lintas sektor agar pengendalian proyek menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

4. 2. Saran

Merujuk pada kesimpulan diatas dan menganalisa hasil pembahasan pada bab sebelumnya, untuk meningkatkan kinerja pengendalian BPPW terhadap proyek IPAL di Kota Jambi, diperlukan masukan sebagai berikut:

1. BPPW perlu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya Dinas PUPR Kota Jambi, dengan melibatkan mereka secara aktif dalam perkembangan yang terjadi pada proyek IPAL. Keterlibatan ini penting untuk memperkuat pengawasan bersama yang berdampak langsung terhadap kelancaran proyek di lapangan.
2. BPPW disarankan untuk tidak hanya mengandalkan laporan tertulis dan forum *weekly meeting*, diperlukan pengawasan langsung di lapangan secara berkala untuk memverifikasi progres dan menangani permasalahan secara langsung dan konkret.
3. BPPW perlu meningkatkan partisipasi publik dengan menyediakan forum aduan masyarakat secara terbuka dan responsif, agar warga terdampak proyek IPAL dapat menyampaikan keluhan atau saran yang akan dijadikan bahan evaluasi dan tindak lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, H. (2023). *Proyek Jaringan IPALD di Kota Jambi Segera Selesai*. Rri.Co.Id. <https://www.rri.co.id/daerah/490937/proyek-jaringan-ipald-di-kota-jambi-segera-selesai>
- Amruddin, Priyanda, R., & Agustina, T. S. (2022). *Metodologi Penelitian*.
- Anggraini, A., Rachman, I., & Sampe, S. (2021). Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Limbah Industri PT Delta Pasifik Indotuna di Kelurahan Girian Bawah Kota Bitung. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–11.
- Annisa, V. N., Amanda, R. G., & Sari, F. K. (2024). *Dampak eksternalitas dari penundaan proyek ipal terhadap kenyamanan masyarakat di kota jambi*.
- Asvi, Z. (2017). *Manajemen Badan Usaha Milik Desa Bina Usaha Desa Kepenuhan Barat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu*. 4(2), 1–23. <https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/879>
- Dahruji, D., Wilianarti, P. F., & Totok Hendarto, T. (2016). Studi Pengolahan Limbah Usaha Mandiri Rumah Tangga dan Dampak Bagi Kesehatan di Wilayah Kenjeran, Surabaya. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 36. <https://doi.org/10.30651/aks.v1i1.304>
- Darma, Y. (2024). *Inilah Profil Proyek Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Kota Jambi: Bakal Diresmikan Jokowi*. Mediajambinews.Com.
- Djadjuli, D. (2018). Pelaksanaan pengawasan oleh pimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 565–573. <https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/879>
- Fajriah, S., Erawan, E., & Zulfiani, D. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Warga Binaan Dalam Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Di Kota Samarinda. *Journal Administrasi Negara*, 7(1), 6717–6729.
- Fauzan. (2024). *Sistem Pengendalian Manajemen* (Vol. 1, Issue 36). www.pustakaindigo.com
- Fiantika, F. R., Wasil, M., & Jumiati, S. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue March).
- Hendrawati, H. (2015). Manajemen Pemerintahan Daerah. *Penerbit Pustaka Radja, April 2014 Surabaya*, 3, 103–111.
- Heston, Y. P. (2017). Identifikasi Masalah Tata Kelola Instalasi Pengolahan Air Limbah (Ipal) Terpusat Di Kabupaten Bandung Governance Problem

Identification of Waste Water Treatment Instalation (Ipal) in Bandung District. *Jurnal Sosek Pekerjaan Umum*.

Isman, A. N. (2024). *Jokowi Resmikan Proyek IPAL Losari Makassar Senilai Rp 1,2 Triliun* 2025-04-25 10~59~49Z. Detik.Com.
<https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7205661/jokowi-resmikan-proyek-ipal-losari-makassar-senilai-rp-1-2-triliun>

Istianto, B. (2011). *Manajemen Pemerintahan (dalam Perspektif Pelayanan Publik)*.

Jambikota.go.id. (2022a). *GEOGRAFIS*. Jambikota.Go.Id.
<https://kotajambisatu.jambikota.go.id/dataset/geografis>

Jambikota.go.id. (2022b). *Kondisi Demografi*.
https://www.jambikota.go.id/tentang/profil/kondisi_demografi

Jambikota.go.id. (2022c). *Sejarah Kota Jambi*.
<https://www.jambikota.go.id/tentang/profil/sejarah>

Khaatimah, H., & Wibawa, R. (2017). Efektivitas Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition Terhadap Hasil Belajar. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 2(2), 76–87.

Laksono, M. Y. (2023). *Tuntas Agustus, IPAL Kota Pekanbaru Pakai Teknologi FBAS*. Kompas.Com.
<https://www.kompas.com/properti/read/2023/07/16/080000221/tuntas-agustus-ipal-kota-pekanbaru-pakai-teknologi-fbas#:~:text=Pembangunan IPAL Skala Perkotaan ini,progres fisiknya telah mencapai 94%25>.

Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling Info Artikel Abstrak. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>

Localisesdgs-indonesia.org. (n.d.). *Kota Jambi*. Retrieved January 9, 2025, from <https://localisesdgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/7>

Lumunon, E. I., Riogilang, H., & Supit, C. J. (2021). Evaluasi Kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal Kiniar Di Kota Tondano. *Tekno*, 19(77), 67–76. <https://ejournal.unsrat.ac.id>

Muhamad, S. F., Tui, F. P. D., & Nani, Y. N. (2023). Strategi Kebijakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik: Studi Kasus di Desa Tunggulo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(8), 3535–3543.

Ndraha, T. (2003). *Kybernology*.

- Nurdiani, N. (2014). Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 5(2), 1110. <https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2427>
- Priyanti, N. (2023a). *Inilah Nama 68 Kelurahan dan 11 Kecamatan Terbaru di Kota Jambi, Ada Kelurahan Aur Kenali*. Metrojambi.Com. <https://www.metrojambi.com/metro/131030668/inilah-nama-68-kelurahan-dan-11-kecamatan-terbaru-di-kota-jambi-ada-kelurahan-aur-kenali>
- Priyanti, N. (2023b). *Proyel IPAL di Kota Jambi Tak Kunjung Selesai, Merasa Tergganggu Pengendara Mengeluh*. Metrojambi.Com. <https://www.metrojambi.com/metro/13704511/proyel-ipal-di-kota-jambi-tak-kunjung-selesai-merasa-terganggu-pengendara-mengeluh>
- Proyek IPAL di Kota Jambi Dipastikan Rampung Bulan Ini*. (n.d.). IMCNewsID. Retrieved September 25, 2024, from <https://imcnews.id/read/2024/07/08/23945/proyek-ipal-di-kota-jambi-dipastikan-rampung-bulan-ini/#:~:text=Selain itu di kawasan jalan,presisi%2C karena menggunakan sistem gravitasi.>
- Rachmaddianto, R. (2015). *Implementasi kebijakan program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (SLBM) dalam perspektif pembangunan berkelanjutan (Studi Dinas Pekerjaan I(12), 1992–1996*. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=347172&val=6469&title=Implementasi Kebijakan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat SLBM Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Studi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya K](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=347172&val=6469&title=Implementasi%20Kebijakan%20Program%20Sanitasi%20Lingkungan%20Berbasis%20Masyarakat%20SLBM%20Dalam%20Perspektif%20Pembangunan%20Berkelanjutan%20Studi%20Dinas%20Pekerjaan%20Umum%20Bina%20Marga%20dan%20Cipta%20Karya%20K)
- Rahmadi, R., Prawoto, A., Sari, D., Mandasari, K., Hardinas, M., Rizki, M., Ramadani, N., & Firdaus, M. (2022). Strategi komunikasi lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru pada pengerjaan proyek IPAL dalam menanggapi keluhan Masyarakat Kota Pekanbaru. *Jurnal Zona*, 6(1), 10–16. <https://doi.org/10.52364/zona.v6i1.53>
- Robbins & Coulter. (2012). Management. In *Suparyanto dan Rosad (2015 (Vol. 5, Issue 3)*.
- Romauli Situmeang, R. (2017). Pengaruh Pengawasan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Mitra Karya Anugrah. *Ajie*, 2(2), 148–160. <https://doi.org/10.20885/ajie.vol2.iss2.art6>
- Rukhmana, T. (2021). Memahami sumber data primer, sekunder dan tersier. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 2(2), 28–33.
- Saefrudin. (2017). *Pengorganisasian Dalam Manajemen*. 14(1), 55–64.

- Sanjaya, D. (2023). *Lubang IPAL di Jambi Makan Korban Lagi, Pemotor Terperosok Usai Hindari Truk*. DetikSumbagsel.Com. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7114603/lubang-ipal-di-jambi-makan-korban-lagi-pemotor-terperosok-usai-hindari-truk>
- Saputri, D., Marendra, F., Yuliansyah, A. T., & Prasetya, I. A. A. P. (2021). Evaluasi Aspek Teknis dan Lingkungan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Jurnal Rekayasa Proses*, 15(1), 71. <https://doi.org/10.22146/jrekpros.65833>
- Sattuang, H., Mustari, K., & Syahrul, M. (2020). Analisis Efektivitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Studi Kasus Batikite Resort Jeneponto. *Jurnal Ecosolum*, 9(1), 56–68. <https://doi.org/10.20956/ecosolum.v9i1.10247>
- Sholichin. (2021). Pengolahan Air limbah : Teknologi Pengolahan Air Limbah. *Jurnal Teknik Pengairan*, 2, 1–16.
- Sidiq, U., & Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). <http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE> PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf
- Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M. (2015). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, 4(2), 16.
- Sondang, P. S. (1987). *Filsafat Administrasi*. CV. Haji Mas Agung.
- Sugiyanto, E. (2016). Pengendalian Dalam Organisasi. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Suharyadi, H., & Insani, M. A. (2016). Manajemen Pemerintahan Dalam Program Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan Di Kota Bandung Tahun 2015. *CosmoGov*, 2(2), 239. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.10014>
- Sujanto. (1986). *Beberapa pengertian di bidang pengawasan*. Ghalia Indonesia.
- Supriyanto, B. (2009). *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis)*. Media Brilian.
- Sururama, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan Pemerintahan*. CV Cendikia Press.
- Suryani, S., & et al. (2023). Pembuatan Standard Operating Procedure (Sop) Pendaftaran, Perawatan Dan Penataan, Serta Alur Kerja Pada Display Produk Umkm Di Rumah Bumn Bandung. *Applied Business and Administration Journal*, 2(3), 48–57. <https://doi.org/10.62201/abaj.v2i3.57>

- Taufiq, M. (2018). Urgensi Pengawasan Pimpinan Terhadap Kinerja Pegawai di Era Otonomi Daerah. *Wiga*, 2 No. 2(2), 66–71.
- Terry, G. R., & Rue, L. W. (2019). *Fungsi Manajemen*. 1–8.
https://ab.polimdo.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/Pengantar-Manajemen_TOPIK-4.pdf

LAMPIRAN 1

1. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian KM 15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361
Telp. 082179884053, 082162363212/email: hukum@unja.ac.id/laman:law.unja.ac.id

Nomor : 63/UN21.4/PT.01.04/2025 21 Januari 2025
Lampiran : -
Hal : Pengantar izin penelitian dan Permintaan Data Skripsi

Yth

1. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi
 2. Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jambi
- di
Tempat

Dengan hormat, kami mengharapkan bantuannya untuk dapat memberikan izin penelitian dan permintaan data kepada mahasiswa

Nama : Shafa Mardhotillah
Nomor Induk Mahasiswa : B1B121034
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Sehubungan dengan penulisan Skripsi Yang Berjudul “ **Analisis Pengendalian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kota Jambi** ” Setelah mahasiswa tersebut diatas melakukan penelitian dan permintaan data, mohon kiranya dapat mengirimkan surat kepada kami bahwa mahasiswa tersebut benar melakukan penelitian.

Demikian atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama
Fakultas Hukum,



Prof. Dr. Muskibah, S.H., M.Hum.
NIP 196512041990032001



Catatan:

1. UU ITE No 11 tahun 2008 pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2. Surat Balasan dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAMBI

Jalan H. Agus Salim No. 02 Kota Baru Jambi 36127 Email: Bppw_jambi@pu.go.id Telepon/Faks: (0741) 444076

Nomor : UM 02.01-cb.6/5/
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian dan Pengumpulan Data untuk
Penulisan Skripsi

Jambi, 23 Januari 2025

Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama
Fakultas Hukum Universitas Jambi

di -
Tempat

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama nomor: 63/UN21.4/PT.01.04/2025 tanggal 21 Januari 2025, dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Shafa Mardhotillah
Nomor Induk Mahasiswa : B1B121034
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Diberikan izin untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "**Analisis Pengendalian Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kota Jambi**".

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Cipta Karya (sebagai laporan); dan
2. Direktur Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya.

3. Surat Balasan dari Ombudsman RI Perwakilan Jambi



**PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI JAMBI**

Jl. Empu Sendok No. 07, RT.17, RW.05 Kelurahan Solok Sipin,
Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi 36121, Telp. 0741-3066814, WA.08119693737
Email : jambi@ombudsman.go.id Website : www.ombudsman.go.id

Nomor : B/0005/HM.02.03-08/II/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penelitian dan Permohonan Data

21 Februari 2025

Yth.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi
Di -
Jambi

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 63/UN21.4/PT.01.04/2024 tanggal 6 Januari 2025 terkait Permohonan Izin Penelitian dan Permintaan Data di Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi atas nama:

Nama : Shafa Mardhotillah
No. Mahasiswa : B1B121034
Prog.Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini kami beritahukan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dan pengambilan data di Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan ucapan terima kasih.

Kepala Perwakilan,



Saiful Roswandi

3. Surat Balasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Alamat : Jalan H. Zainir Haviz No. 04 Kota Baru Jambi Telp. 40553
E-mail : dpupr.jambi@gmail.com
JAMBI

Jambi, 20 Februari 2025

Nomor : 400.14.5.4/176/I.1-DPUPR/2025
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Penerimaan Izin Penelitian.

Kepada Yth :
Sdr. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama
Fakultas Hukum Universitas Jambi
di-
J a m b i

Menindak lanjuti Surat dari Universitas Jambi Fakultas Hukum Nomor: 759/UN21.4/PT.01.04/2025 Tanggal 17 Februari 2025 Perihal Pengantar izin penelitian dan penelitian dan permintaan data Skripsi, maka bersama ini kami sampaikan bahwa kami bersedia menerima Mahasiswa tersebut untuk melakukan Pengambilan Data Penelitian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi. Adapun Mahasiswa tersebut sebagai berikut:

No	Nama	NIM
1	Shafa Mardhotillah	B1B121034

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi
MOMON SUKMANA FITRA, ST., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19790821 200604 1 005

LAMPIRAN 2

1. Pedoman Wawancara Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi

Indikator	Pertanyaan
1. Penetapan Standar	1) Bagaimana alur dan mekanisme perencanaan pada bidang atau unit di dalam instansi dalam pengerjaan proyek IPAL? 2) Apakah ada mekanisme umpan balik yang memungkinkan staf untuk memberikan <i>feed back</i> perencanaan proyek yang telah ditetapkan? 3) Apakah terdapat tantangan utama yang dihadapi dalam perencanaan proyek? 4) Seberapa sering perencanaan proyek ditinjau dan diperbarui? Apa yang memicu peninjauan tersebut?
2. Pengukuran	1) Bagaimana cara mengukur skala keberhasilan efektivitas perencanaan yang telah ditetapkan secara keseluruhan? 2) Apa faktor yang menyebabkan aktivitas pengerjaan proyek tidak berjalan dengan yang telah direncanakan sebelumnya? Dan apa solusi dari permasalahan tersebut? 3) Apakah dari segi aspek produktivitas, efisiensi dan kualitas <i>output</i> sudah berjalan dengan semestinya? (sesuai rencana) 4) Sebagai perwakilan dari instansi pemerintahan dalam aspek pengendalian proyek, Bagaimana cara BPPW mengidentifikasi bagian yang memerlukan perhatian lebih serta mengukur efektivitas strategi yang telah direncanakan sebelumnya?
3. Membandingkan	1) Seberapa sering BPPW melakukan evaluasi perbandingan antara hasil aktual dengan standar ideal yang telah ditetapkan? 2) Bagaimana mekanisme untuk mengetahui dan mengatasi <i>gap</i> yang terjadi di lapangan? 3) Kendala apa saja yang sering terjadi sehingga bisa menimbulkan kesenjangan yang bisa mengganggu proses pengerjaan proyek?

4. Tindakan Korektif	1) Bagaimana proses pengambilan tindakan korektif yang telah dilaksanakan di BPPW dalam proses pengerjaan proyek IPAL? 2) Berdasarkan fakta yang terjadi di Lapangan, seberapa sering evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan proyek tetap pada jalurnya? 3) Faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan tindakan perbaikan evaluasi? 4) Apa tindakan yang sering diambil BPPW dalam proses evaluasi?
----------------------	---

2. Pedoman Wawancara Ombudsman RI

Indikator	Pertanyaan
1. Penetapan Standar	1. Bagaimana pandangan Ombudsman RI terhadap penetapan standar pelayanan publik dalam proyek IPAL Kota Jambi? 2. Apakah menurut Ombudsman, BPPW telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan dapat diakses publik dalam pelaksanaan proyek IPAL? 3. Apakah Ombudsman menemukan adanya kelemahan dalam proses penetapan standar pelayanan atau teknis yang berpotensi menimbulkan laporan masyarakat selama proyek IPAL berjalan?
2. Pengukuran	1. Bagaimana pandangan Ombudsman RI terhadap pentingnya penetapan standar dalam proyek-proyek layanan publik, seperti IPAL Kota Jambi? 2. Dalam konteks pengawasan Ombudsman, bagaimana seharusnya proses penetapan standar dilakukan agar partisipatif, transparan dan akuntabel?
3. Membandingkan	1. Bagaimana seharusnya membandingkan hasil pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan berpotensi menimbulkan maladministrasi menurut perspektif Ombudsman? 2. Menurut Ombudsman, apa yang biasanya menjadi penyebab utama terjadinya kesenjangan antara rencana dan realisasi dalam proyek infrastruktur pelayanan publik?

4. Tindakan Korektif	1. Apakah Ombudsman RI memiliki mekanisme untuk mendorong atau merekomendasikan secara langsung tindakan korektif kepada instansi terkait dalam proyek-proyek seperti IPAL? 2. Sejauh mana pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pemantauan dan pelaporan untuk mempercepat pengambilan tindakan korektif? 3. Apa rekomendasi Ombudsman agar tindakan korektif yang dilakukan oleh instansi pelaksana tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pengendalian yang berkelanjutan?
----------------------	--

3. Pedoman Wawancara Masyarakat

Indikator	Pertanyaan
1. Penetapan Standar	1. Apakah pihak pelaksana proyek pernah menjelaskan kepada anda apa saja yang akan dilakukan selama proyek, termasuk tahapan pekerjaan dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar? 2. Apakah anda mengetahui adanya standar pelayanan atau informasi resmi yang disampaikan pemerintah atau pelaksana proyek IPAL sebelum pelaksanaan dimulai?
2. Pengukuran	1. Menurut anda, apakah manfaat dari proyek ini sudah mulai terlihat (misalnya saluran pembuangan lebih baik, lingkungan lebih bersih atau tidak terjadi genangan limbah)? 2. Apakah anda mengetahui sejauh mana perkembangan atau capaian proyek IPAL di lingkungan tempat tinggal anda?
3. Membandingkan	1. Menurut anda apakah proyek IPAL ini dilaksanakan sesuai dengan rencana yang dijanjikan di awal? (dapat berupa waktu pelaksanaan, kualitas jalan atau kebersihan lingkungan) 2. Menurut anda, apakah pelaksana proyek sudah cukup transparan dan terbuka mengenai hal-hal teknis dan prosedur proyek IPAL di lingkungan anda?

4. Tindakan Korektif	1. Jika terjadi masalah akibat proyek IPAL (seperti akses jalan terganggu atau limbah mengalami kebocoran) apakah anda tahu harus melapor ke mana dan bagaimana caranya? 2. Menurut anda, apakah pelaksana proyek sudah cukup transparan dan terbuka mengenai hal-hal teknis dan prosedur proyek IPAL di lingkungan anda?
----------------------	---

LAMPIRAN 3

1. Lampiran Dokumentasi wawancara bersama Bapak Neiklen Rifen Kasongkahe, ST., MT. selaku PPK Sanitasi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi



2. Lampiran Dokumentasi wawancara bersama Bapak Shopian Hadi selaku Asisten Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Jambi



3. Lampiran Dokumentasi wawancara bersama Ibu Enizar Septriani, S. T. selaku Staff Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi



4. Lampiran Dokumentasi wawancara bersama Ibu Lisa selaku Masyarakat Kelurahan Rajawali



CURRICULUM VITAE



I. Data Diri

1. Nama : Shafa Mardhotillah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Jambi, 29 September 2003
3. NIM : B1B121034
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Status Pernikahan : Belum Menikah
7. Warga Negara : Indonesia
8. Alamat KTP : Jl. A. Chatib RT 14 Kelurahan Pematang
Sulur
Kecamatan Telanaipura
9. Alamat Sekarang : Jl. A. Chatib RT 14 Kelurahan Pematang
Sulur
Kecamatan Telanaipura
10. Nomor Telepon/HP : 083171204983
11. E-mail : shafamardhotillah011@gmail.com

II. Pendidikan Formal

Periode (Tahun)	Sekolah/Institusi/ Universitas	Jurusan/Program Studi	Masa Pendidikan
2009-2015	SD Negeri 131 Kota Jambi	-	6 Tahun
2015-2018	SMP Negeri 19 Kota Jambi	-	3 Tahun
2018-2021	SMA Negeri 11 Kota Jambi	IPA	3 Tahun
2021-2025	Universitas Jambi	Ilmu Pemerintahan	-